

### **BAB III**

#### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis tentang pembingkai media online mengenai peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingnya dalam situs online *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia* pada bulan September 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing Robert N. Entman untuk mengidentifikasi 1) *define problem* (pendefinisian masalah), elemen framing yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan; 2) *diagnose cause* (memperkirakan penyebab masalah), bagaimana sumber masalah dipahami oleh wartawan, penyebab disini bisa berarti apa (*what*) dan siapa (*who*); 3) *moral judgment* (melakukan keputusan moral), elemen framing untuk membenarkan/memberi penilaian/argumentasi padaa pendefinisian masalah yang sudah dibuat; dan 4) *treatment recomendation* (menekankan penyelesaian), bagaimana media memberikan solusi untuk masalah tersebut.<sup>30</sup>

#### **1. Temuan Penelitian**

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yakni seleksi isu dan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari isu (realitas)<sup>31</sup>. Pemilihan berita dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi Entman mengenai dua dimensi besar tersebut dalam proses pembingkai berita. Selain itu penyeleksian berita juga didasarkan pada pertimbangan isi, kualitas, maupun bentuk berita. Isu yang diambil dalam penelitian adalah pemberitaan mengenai peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingnya di dua jaringan situs online *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia* (*bbc.com*). Populasi berita mengenai konflik Rohingnya dalam kedua berita online tersebut pada bulan September 2018 berjumlah 58 berita

---

<sup>30</sup> Eriyanto, "Robert N. Entmann" dalam *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 225-227.

<sup>31</sup> Robert N. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Parradigm" dalam *Journal of Communication*, Vol. 43, No.4, 1993, hlm. 53.

dengan rincian 41 berita dari *CNNIndonesia.com* dan 14 berita dari *BBC Indonesia*. Kemudian berita akan diseleksi sebagai sampel penelitian terdiri dari 18 berita dari *CNNIndonesia.com* dan 9 berita dari *BBC Indonesia*.

Penyeleksian ini juga mementingkan aspek penonjolan atau penekanan isu berita, sehingga penelitian ini memilih berita dari segi penempatan bersifat *headlinenews* dan dari segi isi bersifat *hardnews*. *Hardnews* merupakan berita mengenai sebuah peristiwa atau konflik yang baru terjadi. Disebut “*hard*” karena sifatnya yang lugas dan segera.<sup>32</sup> *Hardnews* biasanya melibatkan topik politik lokal maupun internasional, ekonomi, dan sosial. Berita jenis ini menuntut pelaporan langsung karena kepentingan dan waktunya yang relatif singkat. *Hardnews* tetap relevan walaupun diberitakan untuk periode waktu yang signifikan, dan substansinya memungkinkan disertai komentar dan analisis.<sup>33</sup>

Proses framing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cara awak media mengkonstruksi atau mengolah realitas. Pendekatan framing menekankan persepektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Dari cara pandang tersebut pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditekan ataupun ditonjolkan, bagian mana yang harus dihilangkan, dan berita akan dibawa kemana.<sup>34</sup> Pada tahap seleksi isu wartawan hanya memilih aspek tertentu saja, ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*exclude*). Pada aspek penonjolan, penulisan fakta sangat dikaitkan dengan pemakaian kata,

---

<sup>32</sup> Sam N. Lehman-Wilzig dan Michal Seletzky, “Hard News, Soft News, ‘General’ News: The Necessity and Utility of an Intermediate Classification”, dalam *Journalism II* (I), 2010, hlm 16, diakses melalui <http://www.sagepub.co.uk/journalspermission.nav> pada tanggal 04 Desember 2018.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>34</sup> Eriyanto, “Robert N. Entmann” dalam *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm 221.

kalimat, gambar, dan citra tertentu.<sup>35</sup> Kedua tahap tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

### 3.1 Unsur framing media menurut entman

<b>Seleksi Isu</b>	Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah kasus Rohingnya dalam dua situs online <i>CNNIndonesia.com</i> dan <i>BBC Indonesia</i> periode September 2017 Aspek yang dimasukkan dalam berita situs online <i>CNNIndonesia.com</i> dan <i>BBC Indonesia</i> adalah mengenai peran dan respon Indonesia terhadap kasus Rohingnya.
<b>Penonjolan Aspek</b>	58 berita tentang kasus Rohingnya di <i>CNNIndonesia.com</i> dan 18 <i>BBC Indonesia</i> lebih banyak menyoroti bagaimana peran Indonesia dalam membantu menangani konflik Rohingnya, baik dari pihak pemerintah, Organisasi Masyarakat di bidang keagamaan dan kemanusiaan. Dari segi pemilihan kata, kalimat, dan citra secara umum, CNN lebih cenderung menggambarkan peran nyata yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan BBC

#### A. Analisis Berita *CNNIndonesia.com*

##### 1. Define Problem

Konsepsi pertama framing Entman merujuk pada pemberian definisi terhadap masalah (*define problem*) yang diangkat oleh media berita. Elemen ini merupakan bingkai paling utama/ *master frame* untuk menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan.<sup>36</sup> Pemberitaan dalam media online *CNNIndonesia.com* memiliki beberapa definisi permasalahan yang

<sup>35</sup> Eriyanto, "Robert N. Entmann" dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm 222.

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 225.

sering diangkat mengenai kasus Rohingnya di Rakhine Myanmar. *Pertama*, kasus Rohingnya didefinisikan sebagai kasus, tragedi, dan krisis kemanusiaan. *Kedua*, hubungan bilateral, kerjasama, dan politik antarnegara. *Ketiga*, respon Indonesia atas kasus Rohingnya yang melibatkan peran pemerintah, organisasi masyarakat Islam Indonesia, dan beberapa elemen organisasi/aktivis Indonesia lainnya. *Keempat*, dampak kasus Rohingnya bagi Indonesia dan negara ASEAN, diantaranya i) munculnya respon gerakan-gerakan sosial keagamaan yang berpotensi pada gesekan perbedaan antarumat beragama di Indonesia; dan ii) terancamnya situasi keamanan dan stabilitas ASEAN.

Pembingkaiian mengenai peran Indonesia terhadap kasus Rohingnya dalam *CNNIndonesia.com* didasari atas berbagai bentuk pendefinisian. Kasus Rohingnya merupakan kasus yang menimpa etnik muslim Rohingnya di Rakhine Myanmar berawal dari bentrokan antaretnis di Myanmar, kemudian melibatkan sejumlah aparat keamanan Myanmar sehingga berdampak pada pelarian mereka ke beberapa negarda tetangga, seperti Bangladesh dan Indonesia. Kasus ini mendapat banyak respon dari berbagai negara, terutama di Indonesia. Kasus ini mendapat perhatian dari banyak pihak, baik dari pemerintah (Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, dan Aparatus Keamanan Negara seperti TNI AD dan AU), organisasi masyarakat Islam (FPI, PKS, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah), organisasi kemanusiaan (MPKBR, Kamra, Sahabat Muslim Rohingnya), dan beberapa elemen masyarakat Indonesia lainnya. Banyak pihak mendesak pemerintah Indonesia untuk turut andil mengambil langkah nyata dalam membantu penanganan kasus Rohingnya.

*Pertama*, tragedi Rohingnya didefinisikan sebagai kasus, tragedi, dan kriris kemanusiaan. Berikut penjelasan dan contoh dari pendefinisian CNN yang pertama.

Pada tanggal 1 September 2017 *CNNIndonesia.com* memunculkan berita mengenai respon GP Ansor terhadap kasus yang menimpa etnik muslim Rohingnya. Dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor (Wasekjen GP Ansor), Mahmud Syaltout dalam keterangan pers pada hari Jumat (1/9), mengatakan bahwa kasus Rohingnya merupakan tragedi kemanusiaan terparah di kawasan Asia Tenggara pada saat itu, sehingga berdampak pada serangan dan bentrokan antar kedua belah pihak secara beruntun. GP Ansor sebagai badan otonom salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni NU, turut menyoroti pemberitaan mengenai kasus Rohingnya yang juga menimpa etnik muslim di Rakhine, Myanmar. Selain itu, kasus Rohingnya adalah kepentingan bisnis atau geopolitik pemerintah Myanmar.

*“GP Ansor menilai serangan di wilayah yang dihuni etnis Rohingnya pada 2013, 2016, dan 2017 dilakukan berdasarkan kepentingan geopolitik dan khususnya pertarungan kekuasaan.”*

*“Sebab, daerah Arakan dan Rakhine yang dihuni etnis Rohingnya merupakan daerah yang kaya minyak dan gas. Daerah tersebut memiliki cadangan migas terbukti sebesar 1,744 triliun kaki kubik dan 1,569 milyar barel minyak.”<sup>37</sup>*

Menurut hasil analisis GP Ansor dalam berita CNN kasus Rohingnya sudah berjalan sejak 2013 karena kasus ini sebenarnya adalah kasus geopolitik yang berkepentingan pada bisnis pemerintah Myanmar yang berdampak pada kasus kemanusiaan. Serangan yang dilakukan oleh pihak Myanmar sudah terlihat pola-polanya sengaja ditargetkan. Analisis ini didasarkan pada hasil penginderaan satelit UNOSAT maupun HRW. GP Ansor menganggap bahwa masalah ini sudah menjadi praktik umum untuk menutup wilayah apriori kapital. Serangan yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingnya pada

---

<sup>37</sup> Muhammad Andika Putra, “GP Ansor Duga Myanmar Jadi Dalang di Balik Kasus Rohingnya”, (Jumat, 01 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901213937-20-238943/gp-ansor-duga-myanmar-jadi-dalang-di-balik-kasus-rohingya>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

tahun 2013, 2016, dan 2017 didasarkan pada kepentingan geopolitik, pertarungan kekuasaan, dan bisnis, karena letak geografis wilayah yang dihuni etnis Rohingnya kaya akan minyak dan gas, terbukti dari adanya kubik gas yang mencapai 1,744 triliun kaki, dan 1,569 milyar barel minyak.

*CNNIndonesia.com* menghadirkan berita mengenai kasus ini sebagai tragedi dan kasus kemanusiaan yang berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk tinggal dan hidup. Sementara itu MPBKR dalam berita “Pemerintah Indonesia Diminta Terima Pengungsi Rohingnya” (02/09/2017) juga menyoroti bahwa Kasus Rohingnya merupakan kasus kekejaman yang dilakukan rezim Suu Kyi melalui tangan militernya. Kasus ini merupakan Genosida terhadap masyarakat etnis Rohingnya di Myanmar. *CNNIndonesia.com* menyoroti berita Rohingnya lebih pada tragedi kemanusiaan di Myanmar yang disebabkan oleh pemerintahannya sendiri.

*“Krisis kemanusiaan di Rakhine tidak bisa hanya kita lihat dari satu sisi saja, tetapi harus melihat akar dan dampaknya, seperti pengungsi yang berlari ke Bangladesh. Upaya Indonesia untuk membantu krisis di Rakhine ini mulai dari dorongan politik, kerja sama konkrit dan komperhensif dengan Myanmar, hingga penanganan pengungsi.” Imbuh Retno.<sup>38</sup>*

*Kedua*, Definisi CNN adalah hubungan bilateral, kerjasama, dan politik antarnegara. Berikut penjelasan serta contoh berita yang menjelaskan mengenai pendefinisian tersebut.

Kasus Rohingnya mendapat berbagai macam respon elemen masyarakat Indonesia. Respon ini kemudian tidak hanya mempermasalahkan hubungan bilateral antara Myanmar dan Indonesia, namun stabilitas keamanan dan politik dalam negeri sendiri. *CNNIndonesia.com* banyak menghadirkan berita

---

<sup>38</sup> Riva Dessthania Shuasta, “RI Bantu Bangladesh Tangani Lonjakan Pengungsi Rohingnya” (Minggu, 03 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170903160456-106-239139/ri-bantu-bangladesh-tangani-lonjakan-pengungsi-rohingya>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

melalui bingkai respon yang berbeda antara pemerintah dan organisasi-organisasi di dalam negara Indonesia. Bentuk respon ini sudah dilatari oleh nuansa politik di dalam Indonesia sendiri. Organisasi yang beroposis terhadap pemerintah menganggap bahwa pemerintah belum memberikan langkah nyata untuk menolong Rohingya, namun *CNNIndonesia.com* menggambarkan keterlibatan mereka dalam kasus ini hanya dalam gerakan-gerakan sosial, aksi solidaritas, dan demonstrasi. Sementara *CNNIndonesia.com* membingkai peran pemerintah sebagai langkah nyata dalam membantu kasus Rohingya.

Kasus Rohingya adalah isu besar mendapatkan respon dan perhatian dari berbagai media internasional sejak tahun 2013. Konflik diawali dengan serangkaian kerusuhan komunal antara sejumlah kelompok Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya yang meletus di penjuru negara bagian Rakhine Myanmar. Di masa klasik Rakhine merupakan wilayah di bawah Kerajaan Arakan. Rohingya merupakan warga pribumi Arakan, dan sering disebut sebagai “Muslim Arakan” atau “India Arakan”. Sementara itu keberadaannya diolah oleh Myanmar karena dianggap sebagai imigran ilegal atau kelompok etnik yang tidak memiliki negara, seperti etnik Kurdi atau Berber di Timur Tengah.<sup>39</sup> Bagi GP Ansor permasalahan ini merupakan kasus kepentingan bisnis yang memanfaatkan benturan antaretnik dan agama. GP Ansor mendefinisikan kasus Rohingnya sebagai kepentingan bisnis dan geopolitik didasarkan pada hasil analisisnya dalam mempelajari konflik geopolitik yang tidak hanya terjadi di Myanmar namun juga menjadi praktik umum untuk menutup operasi apropriasi di berbagai wilayah.

Dalam berita yang berjudul “Tragedi Rohingya, MUI Desak ASEAN dan OKI Tekan Myanmar” (02/09/17) CNN mewawancarai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsudin, menganggap kasus

---

<sup>39</sup> Sumanto Al Qurtubi, “Sejarah Kalam Muslim Rohingya”, dalam <https://www.dw.com/id/sejarah-kalam-muslim-rohingya/a-40557421> (18 September 2017), diakses pada tanggal 05 Desember 2018.

Rohingnya adalah konflik yang berdimensi etnik dan agama yang berpotensi dan berdampak pada pertentangan antar umat beragama di Indonesia. Selain itu, Masyarakat Profesional Bagi Kemanusiaan Rohingya (MPBKR) merespon kasus Rohingya adalah konflik kemanusiaan yang telah menciderai hubungan politik bilateral sehingga Indonesia didesak untuk mengusir Duta Myanmar.

*““Walau ini berdimensi etnik dan ada keagamaan, janganlah konflik di Myanmar ini kita bawa masuk ke tanah air, khususnya lagi umat Islam dan Buddha,” ucapnya.” “Reaksi atas tragedi di Rohingya juga diserukan oleh Masyarakat Profesional Bagi Kemanusiaan Rohiga di depan Kedutaan Besar Myanmar hari ini. Dalam aksi unjuk rasa, mereka mendesak pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar Myanmar untuk Indonesia.”<sup>40</sup>*

Ketiga, respon Indonesia atas kasus Rohingnya yang melibatkan peran pemerintah, organisasi masyarakat Islam Indonesia, dan beberapa elemen organisasi/aktivis Indonesia lainnya. Berikut Penjelasan dari pendefinisian tersebut.

Dalam beberapa berita, CNNIndonesia.com memberitakan langkah nyata yang diambil pemerintah Indonesia, mulai dari dukungan politik, bantuan kemanusiaan, bantuan kebutuhan hidup, dan dukungan moral. Bantuan tersebut dilakukan pemerintah Indonesia secara bertahap melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Presiden (Wapres). Pada pemberitaan tanggal 03 September 2018, dalam berita “RI Bantu Bangladesh Tangani Lonjakan Pengungsi Rohingya”, Menlu RI belum menjelaskan secara rinci atas bantuan yang diberikan, namun Menlu RI sudah memiliki perjanjian untuk berdiskusi langsung dengan Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto* Myanmar.

---

<sup>40</sup> Elise Dwi Ratnasari, “Tragedi Rohingya, MUI Desak ASEAN dan OKI Tekan Myanmar” (Sabtu, 02 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170902135157-20-238992/tragedi-rohingya-mui-desak-asean-dan-oki-tekan-myanmar>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

Pemerintah RI juga membangun fasilitas rumah sakit bagi warga Rohingya di Rakhine. Pada pemberitaan *CNNIndonesia.com* diungkapkan bahwa pembangunan rumah sakit Indonesia di Rakhine tahap pertama telah selesai dan mulai masuk pada tahap kedua yang meliputi pembangunan ruang dokter dan perawat (dalam berita “Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine Masuk Tahap II, 04 September 2017). Selain itu pemerintah Indonesia telah memberikan sedikit bantuan berjumlah 1 juta US Dolar (13 miliar) untuk membantu warga Rakhine untuk membangun 4 sekolah. Bantuan ini tidak hanya dilayangkan kepada muslim Rohingya, namun juga umat Buddha Rakhine, dengan maksud menciptakan perdamaian antara keduanya (dalam berita “RI Telah Kucurkan Rp 13 Miliar untuk Warga Rakhine”, 06 September 2017).

Dukungan politik diberikan Indonesia dengan mengungkap masalah Rohingya ke PBB. *CNNIndonesia.com* dalam berita “Indonesia Siap Bawa Masalah Rohingya ke PBB”, edisi 06 September 2017, mengungkapkan bahwa Wapres JK mengatakan bahwa masalah yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar bukan hanya masalah agama, tapi juga sejarah, ekonomi, dan politik. Wapres menghimbau agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh konflik Myanmar sehingga menggeneralisir konflik dengan melibatkan umat Buddha di Indonesia. Indonesia juga memberikan bantuan keamanan dengan mengirimkan TNI AD ke Myanmar. Kesiapan ini menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Alfreth Denny, sebagai tugas TNI untuk selalu ikut serta untuk mendukung kebijakan pemerintah (dalam berita “TNI AD Siap Kirim Pasukan ke Myanmar, 07 September 2017).

Presiden RI, Joko Widodo, melalui Sekretaris Negara akan memberikan aksi nyata untuk menangani masalah kemanusiaan dibanding hanya menyatakan kecaman terhadap kasus ini (dalam berita “Pemerintah Prioritaskan Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya, 08 September 2017). Aksi nyata ini dibuktikan dengan pengiriman 4 Hercules yang berisi bantuan

untuk warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh, berupa bantuan tenda, beras, gula, selimut, dan bantuan lainnya (dalam berita “Besok, RI Kirim 4 Hercules Berisi Bantuan untuk Rohingya” (12 September 2017); “Bantuan Tenda dan Beras Indonesia Diterima Pengungsi Rohingya” (15 September 2017); dan “Beras Bantuan RI Sampai ke Tangan 120 Ribu Pengungsi Rohingya (19 September 2017).

Dukungan dan bantuan sebagai langkah nyata yang diberikan pemerintah dalam *CNNIndonesia.com* tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari berbagai elemen organisasi masyarakat. Beberapa ormas mendesak pemerintah untuk membantu Rohingya dengan langkah tegas dan nyata seperti memberi status warga negara terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kamra yang meminta masyarakat untuk membantu lebih banyak lagi kepada muslim Rohingya. Aksi tersebut juga dinyatakan oleh Solidaritas Muslim Perempuan (SMP) yang menganggap bahwa pemerintah hanya memberikan aksi imbauan saja kepada pemerintah.

*“Etnis Rohingya itu tidak butuh imbauan dan imbauan, tapi yang mereka butuhkan saat ini adalah pertolongan,” kata Ifa kepada CNNIndonesia.com di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9).<sup>41</sup>*

*Keempat*, dampak kasus Rohingnya bagi Indonesia dan negara ASEAN, diantaranya i) munculnya respon gerakan-gerakan sosial keagamaan yang berpotensi pada gesekan perbedaan antarumat beragama di Indonesia; dan ii) terancamnya situasi keamanan dan stabilitas ASEAN. Berikut Penjelasan dari pendefinisian tersebut.

Respon terhadap kasus ini menyangkut berbagai elemen di negara Indonesia, dari pemerintah, organisasi masyarakat, keagamaan, hingga kemanusiaan, karena menganggap kasus Rohingnya sebagai kasus serius yang

---

<sup>41</sup> Tiara Sutari, “Muslim Perempuan: Rohingnya Butuh Aksi Nyata Indonesia” (04 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904134328-20-239289/muslim-perempuan-rohingya-butuh-aksi-nyata-indonesia>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

mengorbakan banyak nyawa manusia. Kasus ini tidak hanya berdampak pada negara stabilitas keamanan Myanmar sendiri. Sebagian warga Rohingya mengungsi di daerah Aceh Indonesia. Keterlibatan Indonesia terhadap kasus ini juga berpotensi pada gesekan antar umat beragama di Indonesia, sehingga pemerintah terus menghimbau warga Indonesia untuk tetap tenang menghadapi kasus ini dan pemerintah memberikan kebijakannya untuk turut membantu pengungsian muslim Rohingya. Keterlibatan pemerintah juga atas desakan berbagai organisasi masyarakat serta keagamaan di Indonesia.

Kasus Rohingya juga berpengaruh pada stabilitas keamanan dan hubungan politik antar negara di kawasan negara ASEAN, terutama di Indonesia. Beberapa massa demonstrasi juga mengepung kedutaan besar Myanmar untuk menuntut adanya pengusiran bagi Dubes Myanmar yang dianggap terlibat. Adanya tuntutan ini menunjukkan bahwa tragedi kemanusiaan Rohingya menimbulkan partisipasi kemanusiaan yang berdampak pada terancamnya hubungan bilateral antara Myanmar dan Indonesia. Berbagai aksi dan tuntutan dilayangkan dari berbagai elemen di Indonesia. Salah satunya hal ini digelar dan dikomandoi Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) yang mengglar aksi di depan Kedubes Myanmar. Aksi ini diberitakan CNNIndonesia pada tanggal 04 September 2017.

*“Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN ) hari ini akan menggelar aksi di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta untuk memprotes kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya. Dalam aksi ini, mereka akan mendesak Duta Besar Myanmar angkat kaki dari Indonesia.”*

*““Dia (dubes) harus angkat kaki, lebih baik urusi dulu pembantaian yang telah melanggar hak asasi manusia itu di negaranya,” kata koordinator aksi Thomas Warijo saat dihubungi CNNIndonesia..com, Senin (4/9).”*

*“Thomas menyebut, nantinya akan ada ratusan orang yang tergabung dalam aksi kepung tersebut. Massa berasal dari berbagai elemen, bukan hanya Barisan Muda PAN.”<sup>42</sup>*

Kasus yang berdimensi etnik dan keagamaan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dalam negeri, sehingga pemerintah Indonesia mendapat desakan dari berbagai pihak untuk segera mengambil langkah nyata menolong warga Rohingya. Pasca meletusnya konflik Rohingya juga berpotensi memunculkan gesekan antarumat beragama di Indonesia, seperti Aksi Bela Rohingya 169 di depan Monas dan Borobudur. *CNNIndonesia.com* juga memberitakan mengenai rencana beberapa organisasi Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan (Kamra), yang menghimbau umat muslim Indonesia untuk langsung berjihad ke Myanmar. *CNNIndonesia.com* merekam pemberitaan ini dalam berita yang diterbitkan pada tanggal 03 September 2017 dengan judul “Pemerintah Didesak Beri Status WNI kepada Pengungsi Rohingya” dan berita yang terbit pada tanggal 06 September 2017 dengan judul “FPI: Kami akan Perang Terbuka dengan Myanmar”.

Kasus Rohingya mendapat berbagai macam respon elemen masyarakat Indonesia. Respon ini kemudian tidak hanya mempermasalahkan hubungan bilateral antara Myanmar dan Indonesia, namun stabilitas keamanan dan politik dalam negeri sendiri. *CNNIndonesia.com* banyak menghadirkan berita melalui bingkai respon yang berbeda antara pemerintah dan organisasi-organisasi di dalam negara Indonesia. Bentuk respon ini sudah dilatari oleh nuansa politik di dalam Indonesia sendiri. Organisasi yang beroposis terhadap pemerintah menganggap bahwa pemerintah belum memberikan langkah nyata untuk menolong Rohingya, namun *CNNIndonesia.com*

---

<sup>42</sup> Tiara Sutari, “Tragedi Rohingya, BM PAN Minta Dubes Myanmar Angkat Kaki” (Senin, 04 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904093633-20-239232/tragedi-rohingya-bm-pan-minta-dubes-myanmar-angkat-kaki>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

menggambarkan keterlibatan mereka dalam kasus ini hanya dalam gerakan-gerakan sosial, aksi solidaritas, dan demonstrasi. Sementara *CNNIndonesia.com* membingkai peran pemerintah sebagai langkah nyata dalam membantu kasus Rohingya.

Secara garis besar, kasus Rohingya didefinisikan sebagai tragedi dan krisis kemanusiaan yang melibatkan bentrokan antar etnik Rohingya dengan etnik Buddha Rakhine, dan juga antara etnik Rohingya dengan aparat keamanan Myanmar. Permasalahan ini juga dihadirkan oleh *CNNIndonesia.com* berpengaruh terhadap hubungan bilateral dan stabilitas keamanan antar negara di ASEAN, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, kasus Rohingya tidak hanya diterima sebagai kasus kemanusiaan, namun juga menimbulkan berbagai respon dari elemen-elemen organisasi maupun pemerintah Indonesia yang juga bernuansa politis.

## 2. Diagnose Cause

Elemen framing kedua Entman adalah bagaimana sumber masalah dihadirkan oleh media berita.<sup>43</sup> Penyebab permasalahan dipahami untuk menentukan apa (*what*) dan siapa (*who*) yang dianggap sebagai sumber masalah. Pemberitaan *CNNIndonesia.com* mengenai kasus Rohingya secara umum disebabkan oleh dua hal utama. *Pertama*, bahwa kasus Rohingya diaktori oleh pemimpin pemerintah Myanmar sendiri (Suu Kyi) yang melibatkan tangan-tangan kananya dari anggota bersenjata, seperti tentara dan polisi. *Kedua*, bahwa kasus Rohingya dilatari oleh konflik yang berdimensi antar etnik, yakni antar etnik Muslim Rohingya dengan etnik Buddha di Rakhine sejak tahun 2012. Konflik ini terus berlanjut melibatkan serangan yang dilakukan oleh anggota bersenjata untuk membantai etnik Rohingya sehingga mereka melarikan diri ke negara-negara tetangga. Bentrokan terus

---

<sup>43</sup> Eriyanto, "Robert N. Entmann" dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm 225.

terjadi ketika muslim Rohingya membalas pembantaian dengan menyerang sejumlah pos polisi di Rakhine.

Pada tanggal 01 September 2017 *CNNIndonesia.com* menghadirkan berita “GP Ansor Duga Myanmar Jadi Dalang di Balik Kasus Rohingya” yang menyatakan bahwa serangan pada minoritas muslim Rohingya diduga didalangi oleh negara Myanmar melalui tangan-tangan negara, baik aparat militer, keamanan, kepolisian, maupun pemerintah Myanmar. Dugaan GP Ansor didasarkan dari hasil laporan penginderaan satelit UNOSAT dan HRW yang menyatakan bahwa pola-pola serangan terhadap desa-desa etnis Rohingya yang telah direncanakan targetnya. Perkiraan permasalahan ini berangkat dari pendefinisian isu bahwa kasus Rohingya merupakan kasus yang berangkat dari kepentingan geopolitik dan bisnis Myanmar yang berdampak pada tragedi kemanusiaan.

Serangan kemudian berlanjut pada Jumat (25/8) dengan perusakan fasilitas penampungan pengungsi di Maungdaw Rakhine State Myanmar yang mengakibatkan 104 nyawa melayang dan ribuan warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh (dalam “Tragedi Rohingya, MUI Desak ASEAN dan OKI Tekan Myanmar”, 02 September 2017). Terbunuhnya sekitar 400 lebih orang Rohingya di kawasan Rakhine mendapatkan perhatian besar dari warga Internasional. Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto* Myanmar dianggap tidak pantas menerima nobel perdamaian yang telah didapatkannya pada tahun 1991. Demonstran yang tergabung dalam Masyarakat Profesional Bagi Kemanusiaan Myanmar melakukan aksi pembakaran terhadap foto Suu Kyi di depan gedung Kedubes Myanmar.

*“Dia telah melakukan pembantaian melalui tangan-tangan militernya, rezimnya kejam. Tidak pantas dia dikatakan sebagai perempuan perdamaian,” terang Ichsan. Aksi pembakaran ini pun menurut Ichsan, merupakan bentuk perlawanan terhadap perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Apalagi, Suu Kyi yang saat ini menjabat sebagai penasihat negara Myanmar*

*dinilai tidak mampu menghentikan aksi pembantaian yang berujung Genosida terhadap masyarakat Etnis Rohingya di negaranya.*<sup>44</sup>

Konflik tersebut juga dianggap mengganggu stabilitas negara-negara di ASEAN, terutama di Bangladesh yang harus menangani lonjakan pengungsi akibat konflik tersebut. Banyak warga Rohingya yang akhirnya lari ke wilayah Bangladesh. Bangladesh sudah banyak memberikan bantuan namun belum bisa menangani sepenuhnya pengungsi di Bangladesh. Hal ini dikarenakan pemerintah Bangladesh masih mempertimbangkan kemiskinan yang dialami oleh warganya sendiri. Ketidakmampuan Bangladesh dalam menangani pengungsi akhirnya menggerakkan pemerintah untuk turut andil mengirimkan bantuannya diwakili oleh Menlu RI ke wilayah pengungsian di Bangladesh (dalam Berita “RI Bantu Bangladesh Tangani Lonjakan Pengungsi Rohingya, *CNNIndonesia.com*, diterbitkan hari Minggu, tanggal 03 September 2017).

Keseluruhan berita *CNNIndonesia.com* mendiagnosis peristiwa konflik Rohingya disebabkan oleh pemerintah Myanmar sendiri, yang diaktori oleh Suu Kyi melalui serangan-serangan yang ditargetkan oleh anggota bersenjata Myanmar. Konflik ini dibungkus dengan dimensi etnik dan agama di Rakhine sehingga memicu keterlibatan anggota bersenjata Myanmar untuk memerangi muslim Rohingya. Konflik tersebut untuk memancing serangan balasan yang dilakukan oleh etnik Rohingya sebagai alasan agar aparat keamanan Myanmar kembali menyerang mereka.

*“Etnis Rohingya mengalami tindakan kekerasan dan pengusiran dari tanah tempat tinggalnya di Rakhin State. Perserikatan Bangsa-bangsa memperkirakan hampir 50 ribu warga Rohingya telah*

---

<sup>44</sup> Tiara Sutari, “Pemerintah Indonesia Diminta Terima Pengungsi Rohingya” (Sabtu, 02 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170902114815-106-238978/pemerintah-indonesia-diminta-terima-pengungsi-rohingya>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

*mengungsi untuk menghindari kekerasan yang kembali meningkat sejak akhir pekan lalu.”<sup>45</sup>*

Dampak dari konflik Rohingya juga dirasakan oleh Indonesia yang juga menerima beberapa pengungsi Rohingya. Dampak ini dirasakan tidak hanya dari desakan dari beberapa organisasi masyarakat yang mendesak terhadap pengusiran Dubes Myanmar, pemerintah mendapat berbagai komentar karena dianggap belum mengambil langkah nyata dan tegas untuk warga Rohingya yang terkena konflik. Permintaan pengusiran Dubes Myanmar karena dianggap sebagai bagian dari militer Myanmar yang berpartisipasi terhadap konflik Rohingya.

*“Saya minta agar mengusir Dubes Myanmar dari Tanah Air, tidak ada gunanya memiliki hubungan diplomatik dengan negara yang tidak punya jiwa kemanusiaan,” kata orator demonstrasi Andi Sinulingga di depan Kantor Dubes Myanmar, Cikini, Jakarta Pusat.<sup>46</sup>*

Keinginan tersebut diwakili oleh demonstran MPBKR di depan kedubes Myanmar di Jakarta. Demonstrasi juga dilakukan oleh Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan (Kamra) untuk meminta pengusiran terhadap dubes Myanmar yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terparah di kawasan ASEAN.

*“Hari Rabu kami siap duduki kedubes Myanmar untuk mengusir dubes dari Indonesia.” imbuhnya. Desakan ini muncul setelah bentrokan terbaru antara militer dan etnis Rohingya kembali terjadi di Rakhine pada 25 Agustus lalu hingga menewaskan ratusan orang. Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata terhadap sejumlah pos polisi dan pangkalan militer Myanmar.<sup>47</sup>*

---

<sup>45</sup> Bimo Wiwoho, “PKS Sarankan Jokowi Fasilitas Bantuan untuk Rohingya”(Senin, 04 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904015930-20-239196/pks-sarankan-jokowi-fasilitas-bantuan-untuk-rohingya>, diakses tanggal 10 November 2018.

<sup>46</sup> Tiara Sutari, “Tragedi Rohingya, BM PAN Minta Dubes Myanmar Angkat Kaki” (Senin, 04 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904093633-20-239232/tragedi-rohingya-bm-pan-minta-dubes-myanmar-angkat-kaki>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

<sup>47</sup> Riva Dessthania Shuasta. “Pemerintah Didesak Beri Status WNI Kepada pengungsi Rohingya”, (Minggu 03 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170903103621-106->

Desakan terus terjadi karena langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan harapan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, kemanusiaan, maupun keagamaan di Indonesia. *CNNIndonesia.com* menyoroti perbedaan respon melalui hasil wawancaranya dengan beberapa perwakilan, baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi yang memberikan perhatiannya terhadap konflik. Desakan, komentar, maupun saran yang dilayangkan pemerintah dapat dilihat dalam pemberitaan *CNNIndonesia.com*, berikut:

1. GP Ansor meminta pemerintah Indonesia lebih aktif bersuara dan cenderung memimpin aliansi mitra dialog dan diplomasi hak asasi manusia terkait masalah kemanusiaan yang menimpa Rohingya. (dalam berita “GP Ansor Duga Myanmar Jadi Dalang di Balik Kasus Rohingya”, *CNNIndonesia.com*, Jumat, 01/09/2017);
2. Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, menilai bahwa pemerintah sudah bergerak membantu Rohingya, namun dirasa kurang ‘gretet’. (Dalam berita “Tragedi Rohingya, MUI Desak ASEAN dan OKI Tekan Myanmar”, *CNNIndonesia.com*, 02/09/17);
3. MPBKR mendesak pemerintah Indonesia untuk mau menerima pengungsi Rohingya untuk sementara waktu menetap di Indonesia. (Dalam Berita “Pemerintah Indonesia Diminta Terima Pengungsi Rohingya”, *CNNIndonesia.com*, Sabtu, 02/09/2017);
4. Muhammadiyah mengkritik kebijakan dipolomasi sunyi yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Myanmar dinilai tidak berhasil menekan Myanmar. (Dalam berita “Muhammadiyah Minta RI Sediakan Penampungan Bagi Rohingya, *CNNIndonesia.com*, Minggu, 03/09/2017);

5. Kamra mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan status WNI kepada pengungsi Rohingya. (Dalam berita “Pemerintah Didesak Beri Status WNI Kepada Pengungsi Rohingya”, *CNNIndonesia.com*, Minggu 03/09/2017);
6. Solidaritas Muslim Perempuan mengkritik langkah yang diambil pemerintah hanya sekedar himbauan terhadap Myanmar dan PBB, dan tidak memberikan hasil nyata bagi Rohingya. (Dalam berita “Muslim Perempuan: Rohingya Butuh Aksi Nyata Indonesia, *CNNIndonesia.com*, Senin, 04/09/2017);
7. BM PAN menghimbau agar pemerintah bisa lebih tegas menyikapi kasus Rohingya. (Dalam berita “Tragedi Rohingya, BM PAN Minta Dubes Myanmar Angkat Kaki, *CNNIndonesia.com*, Senin, 04/09/2017).

Masalah yang ditimbulkan dalam konflik Rohingya tidak hanya berdampak pada dalam lingkup Myanmar dan Rohingya saja. Banyak negara-negara ASEAN kemudian terlibat atas kasus tersebut, khususnya Bangladesh di Indonesia. Keterlibatan peran pemerintah di Indonesia dengan memberikan berbagai bantuan terhadap Rohingya dalam *CNNIndonesia.com* masih banyak dimanfaatkan celahnya untuk dikritisi berbagai elemen organisasi di dalamnya. *CNNIndonesia.com* sendiri cenderung menampilkan langkah nyata yang diberikan Indonesia terhadap kasus Rohingya.

### **3. Moral Judgment**

Elemen framing ketiga Entman adalah *Make Moral Judgment* (Membuat Penilaian Moral). Elemen ini untuk memberikan argumentasi atau penilaian terhadap masalah yang sudah melalui tahap pendefinisian dan identifikasi penyebab permasalahan. Dalam upaya pendefinisian dan identifikasi permasalahan, membutuhkan sebuah argumentasi kuat untuk

mendukung gagasan tersebut, berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.<sup>48</sup>

Dalam teks berita *CNNIndonesia.com* kasus Rohingya dinilai sebagai tragedi yang tidak berperikemanusiaan, baik bagi militer Myanmar maupun pemimpin *de facto* Myanmar, Suu Kyi. Suu Kyi sebagai seorang perempuan yang pernah mendapat nobel perdamaian—yang kemudian dijuluki sebagai simbol perdamaian—dianggap tidak pantas lagi menyandang penghargaan tersebut. *Judgment* (penilaian) moral didasarkan dari pemberitaan tentang demonstrasi di Indonesia yang membakar foto Suu Kyi karena telah menciderai perikemanusiaan. *Judgment* juga didapat dari tanggapan dari berbagai tokoh organisasi masyarakat Indonesia yang menilai bahwa Myanmar telah melakukan kekejaman yang tidak manusiawi karena telah menewaskan ratusan nyawa melalui pembantaian.

Ketertindasan yang dialami masyarakat Rohingya juga direspon aktif oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam *CNNIndonesia.com* ditampilkan lebih netral dalam menanggapi kasus Rohingya tanpa menyebut secara langsung bahwa Suu Kyi, Dubes Myanmar, maupun militer Myanmar melakukan kekejaman terparah di kawasan Asia. *CNNIndonesia.com* cenderung menghilangkan aktor konflik ketika memberitakan tentang peran pemerintah Indonesia. Aktor konflik Rohingya oleh *CNNIndonesia.com* dalam berita-berita menyangkut pemerintah Indonesia digambarkan secara general sebagai Myanmar, bukan mewakili subjek tertentu. Sementara *CNNIndonesia.com* menghadirkan penilaian berbeda atas respon dari perwakilan organisasi yang—dalam konteks politik dalam negeri—berposisi dengan pemerintah. Penggiringan wacana yang dilakukan oleh *CNNIndonesia.com* menunjukkan keberpihakannya terhadap kekuatan yang

---

<sup>48</sup> Eriyanto, “Robert N. Entmann” dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm 226.

dimenangkan dalam berita. Netralitas ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Menlu RI yang ditampilkan dalam berita “RI Bantu Bangladesh Tangani Lonjakan Pengungsi Rohingya” (03/09/2017):

*“Krisis kemanusiaan di Rakhine tidak bisa hanya kita lihat dari satu sisi saja, tetapi harus melihat akar dan dampaknya, seperti pengungsi yang berlari ke Bangladesh. Upaya Indonesia untuk membantu krisis di Rakhine ini mulai dari dorongan politik, kerja sama konkret dan komprehensif dengan Myanmar, hingga penanganan pengungsi.” Imbuh Retno.<sup>49</sup>*

Di lain sisi, terdapat kecenderungan yang memungkinkan bahwa pemerintah Indonesia masih menjaga hubungan diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil jalan tengah dalam menghadapi kasus Myanmar. Pemerintah tidak memberikan kepastian dan merespon desakan mengenai status WNI yang mengungsi di Indonesia. Pemerintah juga melakukan diplomasi sunyi agar pemerintah Myanmar menghentikan pembantaian. Di satu sisi pemerintah mengutuk kejadian konflik Rohingya sebagai krisis kemanusiaan. Di sisi lain jalan yang ditempuh tetap menghubungkan antara pemerintah Myanmar dan pemerintah Indonesia.

*CNNIndonesia.com* memiliki kekuatan untuk menggiring atau mengalihkan opini publik ke arah pemberitaan yang berbeda. Pembaca digiring untuk melihat kerja nyata yang sudah dilampaui oleh pemerintah untuk membantu warga Rohingya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sampel berita, seperti “RI Bantu Bangladesh Tangani Lonjakan Pengungsi Rohingya” (03/09/2017); “Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine Masuk Tahap II”; “RI Telah Kucurkan Rp 13 Miliar untuk Warga Rakhine” (06/09/2017); “Indonesia Siap Bawa Masalah Rohingya ke PBB” (06/09/2017); “TNI AD Siap Kirim Pasukan ke Myanmar” (07/09/2017); “Pemerintah Prioritaskan

---

<sup>49</sup> Riva Dessthania Shuasta, “RI Bantu Bangladesh Tangani Lonjakan Pengungsi Rohingya” (Minggu, 03 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170903160456-106-239139/ri-bantu-bangladesh-tangani-lonjakan-pengungsi-rohingya>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya” (08/09/2017); “Besok, RI Kirim 4 Hercules Berisi Bantuan untuk Rohingya” (12/09/2017); “Bantuan Tenda dan Beras Indonesia Diterima Pengungsi Rohingya” (15/09/2017); “Beras Bantuan RI Sampai ke Tangan 120 Ribu Pengungsi Rohingya” (19/09/2017).

Ada dua kemungkinan penggambaran kenetralan pemerintah atas keterlibatannya dalam kasus Rohingya. Pertama, pembingkai berita didasarkan atas kepentingan media. Kedua, pembingkai berita didasarkan murni dari hasil wawancara. Peristiwa dipahami murni dari hasil wawancara sebagai kenetralan pemerintah agar tidak mempengaruhi stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Myanmar.

#### 4. Treatment Recommendation

Elemen terakhir Entman menekankan pada bagaimana masalah diselesaikan oleh media (treatment recommendation).<sup>50</sup> Elemen ini digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan dalam penyampaian berita. Penyelesaian (solusi) suatu permasalahan yang diangkat dalam berita tentu saja tergantung pada bagaimana peristiwa didefinisikan, siapa dan apa yang dipandang sebagai penyebab masalah. *CNNIndonesia.com* membawa berita pada dua permasalahan. *Pertama*, permasalahan umum terletak pada kasus Rohingya. *Kedua*, permasalahan spesifik terletak pada keterlibatan peran Indonesia dalam kasus Rohingya. *Ketiga*, permasalahan ini cenderung disoroti bersamaan oleh *CNNIndonesia.com*.

Permasalahan utama bahwa kasus Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan di Myanmar, kemudian diangkat ke dalam *CNNIndonesia.com*, jelas lebih banyak mengungkap tentang bagaimana kasus Rohingya diterima oleh berbagai elemen di Indonesia. Kasus Rohingya mendapat perhatian besar

---

<sup>50</sup> Eriyanto, “Robert N. Entmann” dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm 227.

dari Indonesia karena berbagai alasan. Pertama, kasus Rohingya menyangkut urusan kemanusiaan, dimana Indonesia sangat mengedepankan asas perikemanusiaan sebagai asas dasar negara, sehingga kasus ini mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun organisasi kemanusiaan di Indonesia. Kedua, kasus Rohingya menimpa etnik muslim di Rohingya, yang mendapat respon solidaritas sesama muslim di Indonesia. Ketiga, kasus Rohingya menimpa Myanmar yang notabene dalam kawasan ASEAN sebagaimana negara Indonesia, dan beberapa warga Rohingya mengungsi di Indonesia. Hal ini menuntut adanya kemungkinan hubungan diplomatik antar keduanya.

Dalam *CNNIndonesia.com*, penyelesaian masalah dalam kasus Rohingya yang melibatkan peran Indonesia dapat ditinjau dalam beberapa hal yang saling berkaitan. *Pertama*, munculnya gerakan solidaritas dari berbagai elemen organisasi kemanusiaan dan keagamaan di Indonesia, baik melalui himbuan maupun aksi demonstrasi, yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia untuk turut andil dalam penyelesaian konflik Rohingya.

Hasil wawancara CNN dengan Sekretaris Jendral GP Ansor dalam “GP Ansor Duga Myanmar Jadi Dalang di Balik Kasus Rohingya” (01/09/2017), GP Ansor meminta pemerintah Indonesia untuk lebih aktif bersuara dan cenderung memimpin aliansi mitra dialog dan diplomasi HAM terkait masalah kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar. Begitu pula dengan MUI, diwakili oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, MUI mengakui peran pemerintah Indonesia untuk Rohingya dan lebih aktif dalam menangani kasus Rohingya.

Pernyataan keras banyak disampaikan oleh gerakan-gerakan solidaritas lainnya, seperti MPBKR, Kamra, FPI, SMP, PKS, yang terus mendesak pemerintah agar lebih tegas menangani kasus Rohingya. Dukungan mereka terhadap Rohingya dinyatakan dalam aksi demonstrasi dan aksi solidaritas di berbagai tempat, seperti di depan patung kuda, kedubes Myanmar, dan Borobudur. Ada beberapa hal yang mereka ungkapkan untuk membantu

menangani kasus Myanmar. Pertama, mendesak pemerintah agar mengusir Dubes Myanmar karena dianggap telah terlibat atas kasus kekerasan di Rohingya. Kedua, mendesak pemerintah untuk memberi status WNI dan tempat tinggal sementara kepada pengungsi Rohingya di Indonesia. Ketiga, FPI dan Kamra berencana mengirimkan pasukan perang jihad membela Rohingya.

Pernyataan keras tersebut tidak terlepas dari gesekan politik mereka yang beroposisi dengan pemerintahan Indonesia saat ini. Sebaliknya *CNNIndonesia.com* menggambarkan secara nyata penyelesaian masalah Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam dukungan politik yang dilayangkan pemerintah Indonesia membawa kasus Rohingya ke PBB dan membentuk diplomasi sunyi (diskusi) langsung dengan pemimpin de facto Myanmar, Suu Kyi, melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI). Kasus Rohingya dibawa ke PBB atas berbagai dasar permasalahan yang tidak hanya menyangkut etnik dan agama, namun permasalahan sejarah, politik, dan ekonomi.

*“Tentu kita akan banyak bicara dengan para pemimpin dunia juga. Tentu akan menjadi bagian pembicaraan juga karena Dewan Keamanan sudah membicarakan,” kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa (5/9) JK mengatakan, masalah yang menmpa etnis Rohingya di Myanmar bukan hanya karena masalah agama, tapi juga sejarah, ekonomi dan politik. Karena itu, ia meminta masyarakat Indonesia tidak terpengaruh konflik di Myanmar.<sup>51</sup>*

*Kedua*, langkah nyata yang diambil pemerintah Indonesia dalam merespon kasus Rohingya, mulai dari dorongan politik, bantuan kemanusiaan, bantuan diplomasi, hinngga bantuan pengungsian warga Rohingya.

---

<sup>51</sup> Lalu Rahadian, “Indonesia Siap Bawa Masalah Rohingya ke PBB” (Rabu, 06 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170906101406-106-239756/indonesia-siap-bawa-masalah-rohingya-ke-pbb>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

Dalam berita “Pemerintah Prioritaskan Bantuan Kemanusiaan bagi Rohingya” (08 September 2017) merupakan framing judul yang dilakukan *CNNIndonesia.com* mengiyakan hasil wawancara wartawan dengan Sekretaris Negara bahwa bantuan yang diberikan pemerintah didasarkan atas hubungan kemanusiaan dan politik. Pertentangan antara pemerintah dan pihak oposisi pemerintah pun terlihat dalam peminggiran *CNNIndonesia.com*, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan aksi nyata dibanding hanya mengecam. *CNNIndonesia.com* sangat jelas mengaitkan antara pertentangan politik dalam negeri dalam menanggapi kasus Rohingya dengan menghadirkan respon dari dua kubu yang berbeda.

*“Kita bersama-sama, ini kan ada permasalahan penanganan masalah politik, tapi lebih penting juga, yang butuh urgen adalah kemanusiaan,” kata Pratikno di sela Diklat Partai Golkar, Jakarta, Jumat (8/9).<sup>52</sup>*

Bantuan dari pemerintah Indonesia mulai diberikan kepada warga Rohingya, seperti pembangunan rumah sakit di Rakhine. Pembangunan rumah sakit di daerah Rakhine tidak hanya ditujukan bagi warga muslim Rohingya, tetapi ke seluruh etnik yang tinggal disitu, terutama warga Buddha Rakhine. Peran pemerintah diberikan sebagai dukungan perdamaian antar kedua etnik tersebut. Aksi nyata pemerintah yang diberitakan *CNNIndonesia.com* sering dibenturkan dengan kondisi perpolitikan Indonesia di tahun 2017. Mulai muncul gerakan sosial seperti Aksi Bela Rohingya yang memiliki kemiripan dengan Aksi Bela Islam dicetuskan oleh gerakan-gerakan radikal untuk menuntut kasus Ahok. Secara tidak langsung (implisit) *CNNIndonesia.com* meringkai kasus ini dengan kondisi pertentangan antara pemerintah dan oposisinya. Sementara *CNNIndonesia.com* cenderung pada pihak pemerintah

---

<sup>52</sup> Abi Sarwanto, “Pemerintah Prioritaskan Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya”, (Jumat, 08 September 2017), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170908200100-20-240488/pemerintah-prioritaskan-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

dibanding peran organisasi lainnya yang hanya diberitakan sebagai aksi demonstrasi dan kecaman terhadap kasus Rohingya.

Selain itu, aksi nyata pemerintah diberikan dalam berbagai bentuk bantuan diantaranya adalah: 1) mengirimkan pasukan keamanan, TNI AD dan TNI AU, untuk membantu kestabilan kondisi keamanan di Rakhine; 2) memberi dukunga politik melalui jalan diplomasi sunyi dan membawa kasus ke ranah Internasional dan PBB; 3) memberikan bantuan kemanusiaan berupa pengiriman tenda, beras, dana, dan berbagai kebutuhan lainnya ke Bangladesh; 4) memberikan tempat pengungsian dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Langkah nyata tersebut membuktikan bahwa *framing CNNIndonesia.com* cenderung lebih menempatkan peran pemerintah Indonesia yang cukup besar.

**Tabel 3.2 Intensitas CNN Indonesia menampilkan peran Indonesia dalam menangani kasus Rohingya**

Judul	Isi Berita/Wawancara	Sumber Wawancara
“GP Ansor Duga Myanmar Jadi Dalang Di Balik Kasus Rohingya”	Berita diawali dengan pengungkapan kepentingan Myanmar melakukan kekerasan terhadap Rohingya. Kemudian GP Ansor meminta pemerintah lebih aktif bersuara dan memimpin aliansi di ASEAN untuk membebaskan Rohingya	Mahmud Syaltout (Wakil Sekjen GP Ansor)
“Tragedi Rohingya, MUI Desak Asean dan OKI Tekan Myanmar”	Din Syamsuddin menyarankan pembentukan aliansi dari PBB, OKI, dan ASEAN. Din menilai pemerintah sudah bergerak membantu namun dirasa kurang ‘greget’ MPBKR menginginkan	Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan MUI) Andi Sinulingga (Orator demonstrasi dari MPBKR)

	pemerintah mengusi dubes Myamar.	
“RI Bantu Bangladesh Tangani Lonjakan Pengungsi Rohingya”	Pemerintah membantu menangani pelonjakan pengungsi di Bangladesh dan memberikan bantuan diplomasi.	Retno Marsudi (Menlu RI)
“Muhammadiyah Minta RI Sediakan Penampungan bagi Rohingya”	Muhammadiyah menyarankan pemerintah menyediakan kawasan/daerah untuk tempat penampungan. Meminta pemerintah mengevaluasi diplomasi sunyi. Kebijakan diplomasi sunyi dinilai tidak berhasil mendesak Myanmar untuk mencegah kekerasan.	Bachtiar Effendy (Ketua PP Muhammadiyah)
“Pemerintah Didesak Beri Status WNI kepada Pengungsi Rohingya”	Meminta pemerintah sungguh-sungguh menangani kasus Rohingya dengan memberikan status WNI pada pengungsi Rohingya.	Bernard Ali Jabbar (Sekjen Kamra)
“Muslim Perempuan: Rohingya Butuh Aksi Nyata Indonesia”	Meminta pemerintah bertindak tegas atas kasus Rohingya. Menyayangkan pemerintah Indonesia yang hanya memberikan himbauan kepada Myanmar. Meminta pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Myanmar.	Ifa Rohmah (Orator Aksi Solidaritas Muslim Perempuan)
“Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine Masuk Tahap II”	Laporan mengenai pembagunan rumah sakit di rakhine tahap I telah selesai da akan memasuki tahap II dan III.	Retno Marsudi (Menlu RI)

“Tragedi Rohingya, BM PAN Minta Dubes Myanmar Angkat Kaki”	BM PAN meminta pemerintah lebih tegas menanggapi isu Rohingya dengan mengusir Dubes Myanmar dari Indonesia. BM PAN menilai jika pengusiran tersebut merupakan langkah konkret pemerintah.	Thomas Warijo (Koordinator Aksi BM PAN)
“PKS Sarankan Jokowi Fasilitasi Bantuan untuk Rohingya”	Meminta pemerintah mengirimkan kapal berisi bantuan kemanusiaan.	Sohibul Iman (Ketua Umum PKS)
“RI Telah Kucurkan Dana Sebesar 13 Miliar untuk Warga Rakhine”	Indonesia telah memberikan sumbangan sebesar 1 juta US Dolar untuk pembangunan 4 sekolah dan infrastruktur lainnya untuk percepatan rekonsiliasi sosial.	Salman Al Farisi (Staff Ahli Menlu bidang Hubungan Antar Lembaga)
“FPI: Kami Akan Perang Terbuka dengan Myanmar”	FPI akan menyatakan perang terbuka dengan Myanmar jika pemerintah Indonesia dan Myanmar tidak kunjung mendapat kesepakatan untuk mencegah atau mengakhiri kekerasan Rohingya	Slamet Maarif (Juru Bicara FPI)
“Indonesia Siap Bawa Masalah Rohingya ke PBB”	Konflik Rohingya akan dibahas melalui pertemuan Indonesia dengan dewan keamanan PBB	Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI)
“TNI AD Siap Kirim Pasukan ke Myanmar”	TNI AD menyatakan siap jika dibutuhkan untuk dikirim ke Myanmar.	Brigjen TNI Alfred Denny (Kepala Dinas Penerangan TNI AD)
“Pemerintah Prioritaskan Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya”	Pemerintah tengah memprioritaskan bantuan kemanusiaan kepada warga Rohingya dan pendekatan politik dengan Myanmar.	Pratikno (Sekretaris Negara RI)

“Besok, RI Kirim 4 Hercules Berisi Bantuan bagi Rohingya”	Pemerintah RI akan mengirimkan 4 hercules berisi bantuan kemanusiaan berupa makanan, selimut, dll.	Retno Marsudi (Menlu RI)
---	--	--------------------------

## B. Analisis Berita *BBC Indonesia*

### 1. Define Problem

Pendefinisian berita kasus Rohingya dalam *BBC Indonesia* diangkat dalam beberapa pengertian, yakni pendefinisian terhadap kasus Rohingya sendiri, respon masyarakat Indonesia, dan peran pemerintah Republik Indonesia. Pertama, yakni pendefinisian Kasus Rohingnya. Kasus Rohingya merupakan kasus kemanusiaan. Kasus ini berupa kekerasan, kejahatan, krisis, dan pelanggaran HAM terhadap muslim etnik Rohingya, yang berdampak pada ketidakadilan yang dialami etnik Rohingya dan menghambat akses kemanusiaan mereka. Kasus Rohingya sebagai kasus kemanusiaan kemudian mengalami perluasan definisi yang menyangkut hubungan bilateral antarnegara, terutama bagi Myanmar kepada negara lain, respon masyarakat dan Pemerintah Indonesia.

Kasus Rohingya ini langsung mendapat respon dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengecam kejahatan yang dialami oleh muslim Rohingya adalah kejahatan kemanusiaan yang didalangi oleh Aung Suu Kyi sendiri sebagai pemimpin *de facto* (penasehat negara) Myanmar. Kecaman tersebut disampaikan oleh puluhan orang yang tergabung dalam perkumpulan lintas profesi yang berdemo di depan kedubes Myanmar. Hal ini dapat dilihat dalam berita “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’” (2 September 2017).

*“Puluhan orang yang tergabung dalam perkumpulan lintas profesi mendatangi Kedutaan Besar Myanmar di Jakart guna*

*mengancam 'kejahatan terhadap etnik Rohingya'. Para pendemo yang terdiri dari sejumlah pemuda, pria paruh baya hingga ibu rumah tangga membawa sejumlah poster bertuliskan 'Usir Dubes Myanmar' dan 'Penjarakan Kembali Aung San Suu Kyi'".<sup>53</sup>*

Berita tersebut menunjukkan pendefinisian yang paradoks. Di awal berita, redaksi menggiring pembaca memahami kasus Rohingya murni sebagai kasus kejahatan kemanusiaan. Hal ini didukung dari pernyataan redaksi atas pelaku redaksi yang terdiri dari berbagai lintas profesi, seperti pemuda, pria paruh baya, dan ibu rumah tangga. Pernyataan "*Kasus Rohingya adalah kejahatan kemanusiaan*" juga didukung oleh poster yang dibawa oleh para demonstran yang menegaskan bahwa Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto* disebut sebagai "*The Inhuman Lady*", yang berarti 'perempuan tidak berperikemanusiaan'. Pernyataan tersebut semakin menguatkan bahwa redaksi membingkai berita dalam *framing* tindakan kejahatan kemanusiaan.

*Kedua*, respon masyarakat Indonesia terhadap kasus Rohingya di Myanmar. Respon ini diserukan baik dari pihak LSM Kemanusiaan, Ormas Islam, hingga warga Indonesia secara general. Respon masyarakat Indonesia diimplementasikan dalam bentuk aksi, demonstrasi, hingga bantuan-bantuan kemanusiaan yang langsung diberikan kepada korban. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia berdampak macam-macam. Di satu sisi, bantuan-bantuan yang diberikan oleh LSM Indonesia membantu pemberdayaan pendidikan baik bagi muslim Rohingya maupun umat Buddha Rakhine. Hal ini dilakukan untuk meredam konflik antar keduanya. Di sisi lain, aksi dan demonstrasi yang diserukan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras di Indonesia berdampak pada stabilitas keamanan negara Indonesia sendiri. Hal

---

<sup>53</sup> Berita mengenai "Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam 'Kejahatan terhadap Rohingya'" (2 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41134150>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

ini dapat dilihat dari tindakan mereka saat mengepung Candi Borobudur di Jawa Tengah dan perekrutan relawan jihad ke Myanmar.

Fakta-fakta yang disajikan berita mengarah pada hal-hal yang bersifat paradoksal sehingga berpengaruh pada konsistensi bingkai berita. Demonstrasi yang awalnya dikemas sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, kemudian bergeser pada bentuk solidaritas keagamaan. Demontran yang awalnya dituliskan berasal dari perkumpulan berbagai orang lintas profesi, kemudian dibenturkan dengan atribut dan simbol-simbol keagamaan yang dipakai oleh para demontran. Pernyataan ini ditegaskan dalam gambar dan beberapa kutipan berita. Gambar dalam berita tersebut menunjukkan para demontran yang memakai busana serbaputih; ada beberapa yang memakai ikat kepala hitam bertuliskan kalimat tauhid; dan poster bertuliskan “save muslim”. Berikut adalah kutipan dan gambar berita yang merujuk pada simbol-simbol agama.

*“Para pendemo yang terdiri dari sejumlah pemuda, pria paruh baya hingga ibu rumah tangga membawa sejumlah poster bertuliskan ‘Usir Dubes Myanmar’ dan ‘Penjarakan Kembali Aung San Suu Kyi. Mereka memakai busana serbaputih dan atribut muslim.’”<sup>54</sup>*

Gambar berita:

**Gambar 3.1 Demonstran kecam kejahatan terhadap Rohingya<sup>55</sup>**

---

<sup>54</sup> Ibid, “Didepan Kedutaan Myanmar,...”.

<sup>55</sup> Sumber: “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demontran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’”, *BBC Indonesia*, tanggal 2 September 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41134150>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017.



Paradoks pendefinisian berita ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para demonstran yang ditampilkan dalam berita. Di satu sisi, seorang peserta demo bernama Rahmat yang berasal dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menganggap bahwa aksi yang dilakukan adalah tindakan spontan untuk menyerukan solidaritas terhadap muslim Rohingya. Aksi Solidaritas ini didasari atas kesamaan agama dan akidah.

*Rahmat, yang datang dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku berkumpul secara spontan. "Ini aksi solidaritas sesama muslim, kita kan satu akidah. Apalagi (komunitas Rohingya) dibantai di tempatnya nggak kenal usia, anak-anak, perempuan," katanya<sup>56</sup>.*

Sementara itu pimpinan demo, Irfan Ghani, menyatakan bahwa aksi solidaritas dilakukan untuk menyuarakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap muslim Rohingya. Aksi ini terdiri dari masyarakat yang profesional yang peduli terhadap kasus Rohingya. Irfan juga menekankan bahwa demonstrasi dilakukan murni sebagai solidaritas kemanusiaan.

---

<sup>56</sup> Sumber: "Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam 'Kejahatan terhadap Rohingya'", *BBC Indonesia*, tanggal 2 September 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41134150>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017.

*Ketika ditanya apakah pihaknya terdiri dari umat muslim yang mengancam pemerintah Myanmar, Irfan menepis. “Ini bukan konflik agama. Kita lintas agama, lintas profesi. Kejahatan kemanusiaan tidak membedakan agama dan keyakinan, karena kejahatan kemanusiaan bersifat universal. Kebetulan etnis yang digenosida pemerintah Myanmar adalah umat muslim,” kata Irfan kepada BBC Indonesia.<sup>57</sup>*

*Ketiga, peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Rohingya. Peran pemerintah dalam kasus ini memberikan langkah nyata, baik mengirimkan bantuan untuk muslim Rohingya di Myanmar dan Bangladesh. Pemerintah juga menyediakan tempat tinggal sementara bagi muslim Rohingya yang melakukan pelarian ke Indonesia. Selain itu, bantuan pemerintah juga dilakukan dalam bentuk dukungan diplomasi dan politik, baik ke pemerintah Myanmar, PBB, dan organisasi HAM internasional. Pemerintah juga aktif untuk tetap menjaga stabilitas dalam negeri yang diakibatkan dari aktivitas-aktivitas radikal kelompok garis keras yang melakukan pembelaan terhadap Rohingya. Pemerintah tidak ingin kasus Rohingya memicu konflik antar umat beragama di Indonesia.*

*Paradoks dari tujuan aksi solidaritas tersebut menunjukkan bahwa kasus Rohingya juga berpengaruh terhadap gesekan antar umat beragama di Indonesia. Demonstrasi dilakukan juga untuk mendesak pemerintah Indonesia agar lebih proaktif dan turut andil dalam menangani kasus Rohingya. Aksi-aksi tersebut dikhawatirkan berdampak pada tindakan radikalisme di Indonesia. Beberapa aksi juga digelar oleh ormas Islam di beberapa titik tempat di Indonesia. Salah satunya adalah aksi yang dilakukan oleh alumni gerakan 212 di Candi Borobudur, Yogyakarta. Aksi tersebut secara tidak langsung dapat memicu gerakan-gerakan radikal yang berdampak pada*

---

<sup>57</sup> Sumber: “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’”, *BBC Indonesia*, tanggal 2 September 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41134150>, diakses pada tanggal 28 Desember 2017.

gesekan antar umat beragama di Indonesia. Hal ini ditakutkan akan bertentangan dengan misi keberagaman di Indonesia, sehingga kepolisian di daerah Jawa Tengah menetapkan siaga I dan melarang aksi apapun di tempat bersejarah untuk menghindari perpecahan.

Dalam berita “Aksi Ormas Islam Dekat Borobudur: “Magnet Rohingya Bisa Lebih Kuat dari Kasus Ahok”” (BBC Indonesia, 6 September 2017), pemilihan lokasi dekat Candi Borobudur dilakukan para demonstran bertujuan untuk menarik dunia. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan koordinator aksi, Anang Imanuddin. Anang juga menganggap bahwa kasus Rohingya dipahami sebagai kejahatan kemanusiaan yang perlu diperjuangkan. Kasus Rohingya kemudian direlevansikan dengan kasus Ahok, sehingga para demonstran berharap bahwa aksi yang dilakukan akan lebih besar dibanding kasus Ahok. Muncul kekhawatiran pemerintah Indonesia bahwa kasus Rohingya berpotensi memicu konflik antar umat beragama di Indonesia, sehingga polisi menetapkan siaga I di Jawa Tengah untuk meredam segala bentuk radikalisme yang memanfaatkan isu Rohingya.

*“Dia menampik tuduhan bahwa pihaknya ingin menyudutkan umat Buddha di Indonesia. Sebelumnya, ada informasi yang berebedar di media sosial mengklaim bahwa aksi itu ingin ‘mengepung Candi Borobudur.’”<sup>58</sup>*

Anang menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan murni atas solidaritas kemanusiaan, karena menganggap bahwa pembantaian yang menimpa etnik muslim Rohingya kejahatan kemanusiaan yang sungguh biadab. Aksi juga dilakukan untuk mendesak pemerintah agar bersikap tegas dalam menangani kasus Rohingya. Mereka menginginkan pemerintah memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar. Mereka menyarankan agar pemerintah mengusir

---

<sup>58</sup> Berita mengenai “Aksi Ormas Islam Dekat Borobudur: “Magnet Rohingya Bisa Lebih Besar dari Kasus Ahok””, *BBC Indonesia*, (6 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41170631>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

dubes Myanmar dari Indonesia. Selain itu mereka menuntut agar pemerintah melakukan gugatan ke pihak Internasional, seperti PBB dan organisasi HAM.

*“Tuntutannya kami ingin pemerintah Indonesia bersikap tegas, usir duta besar Myanmar dari Indonesia, memutus hubungan bilateral dengan Myanmar, dan menggugat PBB dan organisasi HAM internasional,” jelasnya. Lokasi dekat candi dipilih, menurutnya, karena ingin menarik perhatian dunia.”<sup>59</sup>*

Pada nyatanya aksi yang dilakukan oleh ormas Islam di Indonesia mengarah pada tindakan radikalisme yang menyerukan jihad ke Myanmar. Beberapa ormas Islam membuka *rekrutment* bagi muslim yang bersedia mengikuti jihad. Hal ini terjaring dalam perbincangan-perbincangan media sosial melalui *platform* ‘jihad’ dan ‘Rohingya’. Menurut pengamatan Mark Wilson, seorang pengamat Asia Tenggara di BBC Monitoring, istilah-istilah yang lekat dengan ‘jihad’ dan ‘Rohingya’ mengalami kenaikan mulai tanggal 25 Agustus sampai 15 September di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Rohingya berdampak pada peningkatan aktivitas radikalisme di Indonesia dan menyatukan kelompok-kelompok garis keras, seperti FPI dan kelompok-kelompok pendukung ISIS (Al Qaida).

*Seruan tersebut dikeluarkan oleh akun-akun yang selama ini mempromosikan atau membagikan konten yang dikeluarkan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) dan Al Qaida. Akun-akun tersebut dikategorikan sbagai akun yang mendukung gerakan global Islam radikal sedang penggolongan kedua adalah akun-akun yang mendukung gerakan garis keras di Indonesia.”<sup>60</sup>*

---

<sup>59</sup> Berita mengenai “Aksi Ormas Islam Dekat Borobudur: “Magnet Rohingya Bisa Lebih Besar dari Kasus Ahok””, *BBC Indonesia*, (6 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41170631>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>60</sup> Berita mengenai “Krisis Rohingya ‘menyatukan’ kelompok-kelompok garis keras di Indonesia”, *BBC Indonesia*, (20 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41334082>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

Seruan dan aksi yang dilakukan oleh kelompok garis keras di Indonesia berpengaruh pada stabilitas keamanan di negara Indonesia. Pemerintah tidak serta merta tinggal diam melihat merebaknya isu radikalisme yang memanfaatkan krisis Rohingya. Mantan Kepala BNPT Indonesia, Ansyad Mbai, menanggapi hasil monitoring BBC bahwa pemerintah mengambil langkah strategis untuk membantu Rohingya agar mampu meredam peningkatan aktivitas radikalisme di Indonesia. Langkah yang diambil Indonesia dengan memberikan bantuan diplomatis, bantuan kemanusiaan, dan bantuan material.

*“Langkah pemerintah sudah tepat. Pemerintah Indonesia dengan cepat merespon dengan memberi bantuan terhadap para pengungsi (Rohingya), sehingga otomatis isu-isu itu akan tereliminir,” kata Ansyad kepada BBC Indonesia, hari Kamis (21/09).<sup>61</sup>*

Respon atas kasus ini tidak hanya datang dari pemerintah Indonesia, PBB sebagai organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 turut memberi respon atas kasus yang menimpa muslim Rohingya. PBB menganggap bahwa kekerasan terhadap muslim Rohingya adalah tragedi pembersihan etnik muslim di Myanmar. Berkaitan dengan munculnya isu terorisme di lingkup internasional, kasus Rohingya dianggap sebagai pembersihan terorisme sehingga para milisi Rohingya membalas dendam dengan menyerang pos-pos polisi dan angkatan bersenjata pada 25 Agustus 2017.

*Krisis kemanusiaan di Rakhine pecah pada 25 Agustus setelah milisi menyerang pos-pos keamanan yang dibalas dengan operasi militer Myanmar yang dikatakan sebagai operasi pembersihan teroris’. Gelombang kekerasan menyebabkan lebih dari 400.000 warga Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.*

---

<sup>61</sup> Mohammad Susilo, “Langkah nyata Indonesia ‘Bisa Redam Radikalisme Yang Manfaatkan Isu Rohingya’”, *BBC Indonesia*, (21 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41347697>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

*PBB menyebut kekerasan terhadap warga Rohingya 'sebagai jelas-jelas pembersihan etnik'.<sup>62</sup>*

Bantuan terhadap muslim Rohingya juga diberikan oleh Lembaga Kemanusiaan Nasional (LKN) atau lembaga yang menangani swadaya masyarakat, PKPU Human Initiative (PKPU HI). PKPU HI sendiri berdiri saat terjadi tragedi kemanusiaan. pada tahun 1997-1999 oleh sekelompok pemuda yang aktif melakukan aksi sosial dengan memberikan harapan untuk negeri. PKPU HI sudah mendapat legitimasi baik dalam negeri maupun dunia internasional, dari Menteri RI, PBB, hingga UNI Eropa.<sup>63</sup> PKPU HI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) untuk membantu muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. AKIM terdiri dari 11 lembaga diantaranya, PKPU HI sendiri, Palang Merah Indonesia (PMI), Aksi Cepat Tanggap (ACT), Muhammadiyah, NU, dan lembaga-lembaga lainnya. Bantuan diberikan berupa bantuan kemanusiaan, material, dan akses kesehatan.

*Tomy Hendrajati, Direktur Prgram PKPU, sebuah LSM yang membantu etnis Rohingya di Myanmar, mengungkapkan 'kebutuhan dasar seperti makanan, mie instan, pakaian, susu dan pampers untuk bayi' adalah yang paling dibutuhkan warga Rohingya di wilayah Rakhine yang tengah berkonflik. "Mereka itu mendapatkan kebutuhan tersebut dari bantuan. Akses kesehatan juga (dari bantuan)," ungkap Tomy kepada BBC Indonesia, Seni (04/09).<sup>64</sup>*

---

<sup>62</sup> Mohammad Susilo, "Langkah nyata Indonesia 'Bisa Redam Radikalisme Yang Manfaatkan Isu Rohingya'", *BBC Indonesia*, (21 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41347697>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>63</sup> PKPU HI. "Cerita Kami: Bagi Kami, Sejarah adalah Inspirasi untuk Terus Melakukan yang Terbaik Hari Ini dan Masa Mendatang", <https://pkpu.org/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

<sup>64</sup> Rafki Hidayat, "Kekerasan Rohingya: Apa yang Harus Dilakukan Warga Indonesia" (5 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144847>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

Kasus Rohingya juga mendapat tanggapan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Jokowi memahami kasus Rohingya sebagai krisis kemanusiaan yang harus dihentikan lewat aksi nyata, bukan hanya kecaman-kecaman semata. Respon Jokowi bertolak belakang dengan aksi yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang melakukan demonstrasi dengan menyatakan aksi bela Rohingya. Hal ini menunjukkan bahwa isu Rohingya mampu berpengaruh pada stabilitas hubungan antar elemen di Indonesia.

*Pengungsian besar-besaran ini terjadi menyusul aksi kekerasan yang melibatkan aparat keamanan Myanmar dan kelompok gerilyawan Rohingya, yang menamakan diri Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Menurut Jokowi, penyesalan Indonesia atas krisis kemanusiaan di Myanmar tidak berhenti pada pernyataan kecaman-kecaman semata. "Perlu sebuah aksi nyata," katanya.<sup>65</sup>*

Dalam "Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi" (4 September 2017), pemerintah Indonesia diwakili oleh Menlu RI menyatakan tindakan untuk membantu Rohingya. Bagi pemerintah RI, kasus Rohingya merupakan murni krisis kemanusiaan sehingga pertolongan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya menyasar muslim Rohingya, namun juga diberikan kepada umat Buddha Rakhine. Hal ini didasarkan atas dasar kemanusiaan dengan tujuan untuk mendamaikan antara kedua etnik tersebut tanpa membedakan agama maupun latar belakang mereka. Menlu Retno juga merekomendasikan formula 4+1 untuk Suu Kyi agar mengambil tindakan mengatasi konflik. Bagi Retno (Menlu RI) kasus Rohingya ia pahami sebagai kasus kemanusiaan yang akhirnya berdampak pada stabilitas keamanan Myanmar sendiri dan hubungan diplomatiknya terhadap negara-negara di ASEAN.

---

<sup>65</sup> Berita mengenai "Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar 'Hentikan dan Cegah Kekerasan' (3 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41140890>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

*“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk,” jelas Menlu RI.<sup>66</sup>*

Selain respon dari pemerintah RI, LSM, dan Ormas-ormas Islam, kasus Rohingya juga mendapat respon dari umat Buddha Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa tragedi Rohingya adalah kasus kemanusiaan, dimana setiap elemen masyarakat Indonesia turut andil membantu atas nama kemanusiaan tanpa membedakan suku, ras, maupun agama mereka berasal. Umat Buddha Indonesia berkontribusi besar dalam membantu rumah sakit di Rakhine. Dalam berita “Umat Buddha Indonesia Penyumbang Terbesar Pembangunan RS di Rakhine” (15 September 2017) dijelaskan bahwa pembangunan rumah sakit memang untuk menjembatani kedua kubu yang sedang bertikai. Bantuan ini disalurkan melalui organisasi Walibu sebagai salah satu organisasi umat Buddha di Indonesia. Pembangunan rumah sakit juga didasari atas harmonisasi kerjasama antara pemerintah Myanmar, pemerintah Indonesia, dan masyarakat Indonesia yang turut andil memberikan langkah nyata untuk mengatasi konflik Rohingya.

*Dana dari masyarakat Indonesia untuk membangun rumah sakit itu, sejauh ini, terus mengalir, termasuk sumbangan uang dari umat Buddha di Indonesia, melalui organisasi Walubi. “Ini sepenuhnya kegiatan yang bersumber dari masyarakat Indonesia,” kata pelaksana harian Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI, Ginandjar Kartasasmita, di Jakarta, Kamis (14/09).<sup>67</sup>*

Secara keseluruhan berita, *BBC Indonesia* mendefinisikan kasus Rohingya sebagai tragedi dan kasus kemanusiaan yang mendapat perhatian

---

<sup>66</sup> Berita mengenai “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi” (4 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41147802>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>67</sup> Heyder Affan, “Umat Buddha Indonesia Penyumbang Terbesar Pembangunan RS di Rakhine” (15 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41268105>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

besar di tingkat Internasional, terutama di Indonesia. Kasus kemanusiaan tersebut kemudian direspon oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia secara berbeda-beda. Bagi kelompok Islam garis keras, kasus kemanusiaan Rohingya dibenturkan sebagai kasus keagamaan, sehingga mereka berani menyatakan perang (jihad) dengan pemerintah Myanmar. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap stabilitas hubungan antar umat beragama di Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, LSM, dan beberapa elemen masyarakat Indonesia lainnya merespon kasus ini sebagai kasus murni kemanusiaan. Mereka memberikan langkah nyata tidak hanya untuk membantu Rohingya tapi juga mendamaikan antar dua umat beragama yang terlibat konflik untuk menciptakan harmonisasi antar keduanya.

Perbedaan pendefinisian antara situs online *BBC Indonesia* dengan *CNNIndonesia.com* tidak jauh berbeda. Keduanya mendefinisikan kasus Rohingya sebagai kasus kemanusiaan melalui tindak kekerasan, kejahatan, dan pelanggaran HAM yang tidak hanya berdampak bagi muslim Rohingya, namun juga umat Buddha di Rakhine. *CNNIndonesia.com* menampilkan kasus Rohingya cenderung membingkai keterlibatan pemerintah Indonesia yang proaktif dalam menangani kasus Rohingya. *BBC Indonesia* lebih pada pendefinisian kasus Rohingya yang berdampak pada stabilitas keamanan dalam negara Indonesia. *CNNIndonesia.com* dalam pendefinisian cenderung memberi definisi tunggal terhadap kasus ini. Sementara *BBC Indonesia* membingkai cenderung memberikan pendefinisian ganda dalam keseluruhan berita. Kasus Rohingya tidak hanya sebagai kasus kemanusiaan namun juga kasus keagamaan yang berdampak pada stabilitas hubungan antar umat beragama di Indonesia.

## **2. Diagnose Cause**

Pada elemen ini *BBC Indonesia* cenderung lebih netral dalam membingkai perkiraan penyebab masalah (*diagnose cause*). *BBC Indonesia* tidak hanya menyudutkan pihak Myanmar sebagai aktor utama di balik

pembantaian terhadap Rohingya, namun juga serangan balik yang diberikan oleh beberapa etnik Rohingya yang menimbulkan konflik saling serang berkepanjangan.

Dalam beberapa berita yang disajikan oleh *CNNIndonesia.com* secara keras menyatakan bahwa kasus Rohingya didalangi oleh 'orang dalam' Myanmar, seperti dalam "GP Ansor Duga Myanmar Jadi Dalang Di Balik Kasus Rohingya" (Muhammad Andika Putra, *CNNIndonesia.com*, 01 September 2017) menegaskan bahwa serangan kepada muslim Rohingya dilakukan kuat oleh tangan negara, baik aparat militer, keamanan, kepolisian, maupun pemerintah Myanmar, didasarkan pada laporan penginderaan satelit UNOSAT dan HRW atas pola-pola serangan yang telah ditargetkan.

Begitu pula dalam "RI Bantu Bangladesh Tangani Lonjakan Pengungsi Rohingya" (Riva Dessthanian Suastha, *CNNIndonesia.com*, 03 September 2017) menyatakan bahwa serangan balik yang diberikan oleh Rohingya dipicu oleh serangan kelompok bersenjata terhadap sejumlah pos polisi dan pangkalan militer Myanmar hingga mengakibatkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. *CNNIndonesia.com* tidak menampilkan secara jelas pelaku penyerangan terhadap pos polisi dan militer di Rakhine, Myanmar. *CNNIndonesia.com* juga cenderung memperkirakan penyebab masalah secara tunggal, yakni hanya dari pihak Myanmar.

Berbeda dengan itu *BBC Indonesia* secara jelas menampilkan pelaku penyerangan pos polisi dan pangkalan militer adalah Tentara Pembebasan Rohingya Arakan atau sering disebut sebagai Arsa. Hal ini memberikan kejelasan bahwa konflik dipicu oleh oknum-oknum tertentu saja tanpa menggeneralisir pelaku utama konflik. Arsa melakukan penyerangan balik terhadap sejumlah pos polisi dan pangkalan militer yang berdampak pada krisis. Akhirnya sejumlah muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar untuk menyelamatkan diri ke Bangladesh dan beberapa negara tetangga.

Tagar terkait Arsa kemudian muncul mendapat dukungan di beberapa akun media sosial untuk melancarkan aksinya.

*Tagar lain adalah #Arsa yang mengacu pada Tentaran Pembebasan Rohingya Araka, milisi di Rakie yang menyerang beberapa pos keamanan yang kemudian mendorong militer Myanmar melancarkan operasi yang dikatakan sebagai 'operasi pembersihan teroris'<sup>68</sup>.*

Di Indonesia hal ini berdampak pada bersatunya kelompok-kelompok garis keras di Indonesia yang melakukan perang di media sosial dengan memberikan tagar 'relawan, jihad, aksi, bela, Rohingya, dan Arsa'. Hal ini memunculkan bibit-bibit radikalisme di Indonesia dan mengancam stabilitas keamanan dan keberagaman umat beragama di Indonesia. BBC mendiagnosis penyebab permasalahan berasal dari kedua belah pihak. Kasus Rohingya didalangi oleh berbagai oknum yang mengharapkan konflik terjadi. Selain menyoroti angkatan bersenjata dan pemerintah Myanmar, BBC juga memberikan sudut pandang lain dalam menyajikan penyebab masalah. Disinilah BBC terlihat netral dalam membingkai berita tanpa menyudutkan satu pihak.

Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Rohingya dengan mengirimkan Menlu RI untuk bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar. Kehadiran Menlu RI di Myanmar didasari atas keinginan masyarakat Indonesia dalam membantu menuntaskan konflik Rohingya. Mereka terus mengancam apa yang dilakukan oleh anggota bersenjata Myanmar yang melakukan tindak kejahatan dengan membantai umat muslim Rohingya. Hal ini juga direspon oleh seorang pelapor khusus Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk Myanmar, yakni Yanghee Lee. Menurut Yanghee konflik tidak hanya dipicu dari pembantaian oleh anggota militer

---

<sup>68</sup> Berita mengenai "Krisis Rohingya 'menyatukan' kelompok-kelompok garis keras di Indonesia", *BBC Indonesia*, (20 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41334082>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

Myanmar, namun hal ini juga dilandasi atas kegagalan Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto* dalam memberikan hak perlindungan terhadap warganya. Pernyataan ini dilontarkan Yanghee melihat kondisi Rohingya yang tidak kunjung membaik dan menyatakan bahwa pemerintah Myanmar telah gagal melindungi hak seseorang berdasarkan yuridisnya.

*“Pemimpin de facto perlu bertindak... Itulah yang kita harapkan dari setiap pemerintahan, untuk melindungi setiap orang dalam yuridiksinya. Dia terperangkap antara batu dan tempat yang keras, namun saya kira saatnya baginya untuk ke luar dari sana sekarang.” Dia menambahkan sulit untuk meyakini laporan-laporan bahwa militer Myanmar membakar kampung-kampung orang Rohingya di Rakhine.<sup>69</sup>*

Dalam berita “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi” (4 September 2017) BBC Indonesia secara jelas melakukan pembingkaiian terhadap penyebab masalah konflik Rohingya, yakni tertuju pada peran Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto*. Kepasifan Suu Kyi dalam menanggapi kasus Rohingya menjadi sebuah penghakiman bahwa dirinya adalah aktor utama dalam konflik tersebut. Malala Yousafzai seorang pegiat pendidikan yang merai nobel perdamaian bersamaan dengan Suu Kyi juga mengecam kekerasan terhadap kasus ini.

*Sementara itu pegiat pendidikan peraih Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai, menulis pesan di Twitter bahwa dia masih menunggu Aung San Suu Kyi—sesama rekan peraih Nobel Perdamaian—untuk mengecam kekerasan. Menurutnya, perlakuan atas warga Rohingya itu sebagai sesuatu yang ‘tragis dan memalukan’.<sup>70</sup>*

Konflik ini tidak hanya mendapat respon dari dunia Internasional. Indonesia juga turut mengambil langkah-langkah tegas untuk membantu menangani kasus Rohingya, mulai dari bantuan diplomasi hingga kemanusiaan. Langkah-

---

<sup>69</sup> “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi” (4 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41147802>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>70</sup> Ibid, “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi”.

langkah tegas yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari dorongan solidaritas kemanusiaan oleh masyarakat Indonesia. Bentuk solidaritas diekspresikan secara beragam, mulai dari aksi di jalanan hingga turut serta memberikan bantuan kemanusiaan melalui LSM Nasional yang diutus ke Myanmar, seperti PKPU. Menlu RI langsung menemui Suu Kyi untuk memberikan bantuan diplomasi kepada muslim Rohingya.

*Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sudah bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang menjabat Konselor Negara, atau pemimpin tertinggi yang sebenarnya di Myanmar, Sein (04/09). “Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu,” jelas Menlu Retno kepada Aung San Suu Kyi, seperti tertulis dalam pernyataan pers Kemenrian Luar Negeri Indonesia.<sup>71</sup>*

Kekecewaan terhadap kepasifan Aung San Suu Kyi juga mengakibatkan beberapa masyarakat Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lintas profesi turun jalan menggelar aksi protes di depan kedutaan Myanmar. Kecaman tersebut datang karena Suu Kyi tidak segera membereskan kekerasan di Rakhine. Aksi solidaritas digelar atas dasar rasa kemanusiaan dan kesamaan akidah yang mereka pegang. Atribut keagamaan yang dipakai peserta demo merepresentasikan bahwa aksi tersebut juga dilandasi rasa solidaritas keagamaan. Mereka menginginkan pengusiran terhadap duta besar Myanmar sebagai salah satu bentuk tindakan nyata untuk memutus hubungan bilateral antara Indonesia dengan Myanmar.

*Dalam aksi tersebut, para pendemo membakar poster bergambar Suu Kyi sebagai ungkapan kekecewaan terhadap mantan aktivis politik yang kini menjadi pejabat pemerintah Myanmar. Pembakaran itu diikuti dengan triakan “Hidup umat muslim sedunia” dari orator. Rahmat, yang datang dari Kebayoran Lama, Jakarta*

---

<sup>71</sup> “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi” (4 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41147802>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

*Selatan, mengaku berkumpul secara spontan. “Ini aksi solidaritas sesama muslim, kita kan satu akidah. Apalagi (komunitas Rohingya dibantai di tempat nggak kenal usia, anak-anak, perempuan,” katanya.<sup>72</sup>*

Demonstrasi dipicu oleh kondisi Rohingya yang tidak kunjung membaik. Sekitar 40.000 muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari pembantaian mulai 25 Agustus 2017. Sekitar 40 orang juga meninggal dunia di tengah perjalanan menuju Bangladesh. Siklus kekerasan yang semakin memburuk disebabkan oleh gencatan salin serang antara anggota militer dan tentara Arsa (tentara pembebas Rohingya) dan melawan satu sama lain. Hal ini juga berdampak pada bentrokan susulan selanjutnya.

*Pelapor khusus PBB soal hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan “siklus kekerasan yang memburuk” di Rakhine “sangat memprihatinkan dan harus diselesaikan secepatnya”. Eksodus besar-besaran ini terjadi setelah sekelompok gerilyawan Rohingya, yang menamakan diri Arakan Rohingya Salvatio Army (ARSA), menyerang pos polisis Myanmar sehingga menewaskan 12 orang, pada 25 Agustus. Puluhan militan dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut dan bentrokan susulannya.<sup>73</sup>*

Aksi solidaritas ini tidak hanya digelar di depan Kedutaan Besar Myanmar. Beberapa ormas Islam yang terdiri dari alumni gerakan 212 menggelar aksi dengan mengepung Candi Borobudur di Jawa Tengah. Aksi dilakukan karena berbagai sebab. Bagi mereka pemerintah belum memberikan tindakan nyata sehingga Aksi Bela Rohingya digelar agar pemerintah segera bertindak tegas untuk mempertimbangkan hubungan bilateral dengan Myanmar. Koordinator aksi juga menyatakan keprihatinan dan kekecewaan

---

<sup>72</sup> Berita mengenai “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’” (2 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41134150>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

<sup>73</sup> Ibid, “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’”

atas pembantaian biadab yang menimpa muslim Rohingya. Mereka juga berkeinginan bahwa aksi yang digelar akan lebih besar dari Gerakan 212 yang dilayangkan kepada Gubernur Jakarta, Basuki Tjahya Purnama.

*“Ini hasil dari gelombang perasaan yang sama, saya pikir saya cukup optimis, kemarin saya telpon itu menangis, dari berbagai penjurur telepon saya mereka membayangkan kekejaman .itu apabila itu terjadi kepada orang tuanya kepada anaknya. Mereka tergerak untuk benar-benar memprotes ini,” papar Anang. “Sehingga magnet ini sangat kuat, bahkan ini bisa lebih kuat dari magnet ketika Ahok hanya menghina Al Quran waktu itu.”<sup>74</sup>*

Peningkatan aktivitas radikalisme di Indonesia sendiri disebabkan oleh beberapa oknum dari kelompok Islam radikal yang memanfaatkan krisis Rohingya untuk melakukan tindak radikal di Indonesia. Menurut kepala BNPT pemanfaatan isu terkait konflik Rohingya oleh gerakan-gerakan garis keras, yakni untuk menarik simpati kalangan yang pro terhadap kelompok radikal di Indonesia agar mendukung ditegakkannya syariat Islam di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali saja. Aksi dan demonstrasi untuk membela Rohingya atas nama agama sudah muncul sebelum-sebelumnya. Gerakan ini meningkat baik melalui jejaring media sosial dan dunia nyata. Di dalam dunia sosial gerakan tagar yang memanfaatkan diksi-diksi ‘jihad’ digencarkan oleh kelompok tersebut. Sementara di dunia nyata mereka menjaring berbagai kalangan untuk turut aksi mendemo pemerintah maupun kedubes Myanmar. Hal ini terlihat nyata karena mereka memanfaatkan atribut dan simbol-simbol agama. Mereka juga membuka pendaftaran relawan untuk jihad ke Myanmar.

*Ansyaad mengatakan pemanfaatan krisis Rohingya untuk menarik simpati kalangan yang progerakan garis keras di Indonesia tidak terjadi tahun ini saja. [Dimanfaatkan ISIS dan al-Qaida]*

---

<sup>74</sup> Berita mengenai “Aksi Ormas Islam Dekat Borobudur: “Magnet Rohingya Bisa Lebih Besar dari Kasus Ahok””, *BBC Indonesia*, (6 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41170631>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

*Beberapa tahun lalu Densus 88, unit antiterorisme Polri, menangkap beberapa orang yang akan menyerang kedutaan Myanmar di Jakarta. "Setiap kali ada insiden di sana (Myanmar) pasti direspons oleh kelompok radikal di Indonesia," kata Ansyaaad.<sup>75</sup>*

Aksi tersebut juga dilandasi atas kejadian serang balik yang dilakukan oleh milisi Myanmar yang mengatasnamakan kelompoknya dengan sebutan ARSA. Hal ini juga dikhawatirkan dimanfaatkan oleh ISIS untuk merekrut milisi kelompok garis keras. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep kenegaraan Indonesia yang memerangi aksi terorisme. Sementara isu Rohingya sangat kuat direspons oleh kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada stabilitas kerukunan umat beragama di Indonesia.

*Yang menjadi kekhawatiran beberapa pihak adalah isu ini akan dimanfaatkan oleh kelompok pro-ISIS dan al-Qaida sebagai sumber perekrutan milisi kelompok garis keras. Krisis kemanusiaan di Rakhine pecah pada 25 Agustus setelah milisi menyerang pos-pos keamanan 'yang dibalas dengan operasi militer Myanmar yang dikatakan sebagai operasi pembersih teroris'.<sup>76</sup>*

Sementara aksi bela Rohingya di Jawa Tengah digelar di Candi Borobudur yang secara tidak langsung (tujuan implisitnya) menyudutkan umat Buddha, pembangunan rumah sakit di Rakhine yang diinisiatif oleh organisasi *Medical Emergency Rescue Committee* (Mer-C) juga mendapat sokongan dari umat Buddha di Indonesia melalui organisasi Wallubi. Disini BBC menekankan bahwa konflik Rohingya dipahami murni sebagai krisis kemanusiaan. Hanya saja beberapa oknum memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan pribadi organisasi mereka.

---

<sup>75</sup> Mohammad Susilo, "Langkah nyata Indonesia 'Bisa Redam Radikalisme Yang Manfaatkan Isu Rohingya'", *BBC Indonesia*, (21 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41347697>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>76</sup> Mohammad Susilo, *Ibid.*

Konflik yang menyebabkan pertikaian antar dua etnik di Rakhine menjadi sebab dibangunnya rumah sakit di daerah Mark-U.. Pembangunan rumah sakit ditujukan untuk menjembatani dua etnik yang sedang bertikai. Pemilihan lokasi rumah sakit juga didasari atas alasan heterogenitas kedua etnik yang tinggal di daerah sana sama besar. Bantuan ini untuk meminimalisir konflik antarkeduanya. Selain itu, Bantuan juga merupakan inisiatif umat Buddha untuk merepresentasikan kerukunan umat beragama di Indonesia.

*Dibangun di wilayah Mrak U, negara bagian Rakhine, pembangunan rumah sakit itu diharapkan dapat 'menjembatani' dua kelompok yang bertikai yaitu etnis Rakhine yang menganut Buddha dan etnis Rohingya yang umumnya beragama Islam, kata Mer-C. (...)* "Di tempat itu tidak ada konflik, tapi sudah ada heterogenitas antara dua penduduk itu, etnis Rohingya banyak di sana, dan umat Buddha juga banyak di sana," kata Kepala divisi konstruksi Mer-C, Idrus Muhammad Alatas, Kamis (14/09) di Jakarta.<sup>77</sup>

Isu Rohingya juga direspon oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya penanganan terhadap krisis kemanusiaan yang berdampak besar tersebut. Respon pemerintah tidak hanya disebabkan oleh desakan dari berbagai kelompok garis keras di Indonesia. Jauh sebelum itu pemerintah Indonesia memberikan langkah nyata dalam upaya mengatasi krisis Rohingya. Langkah nyata Indonesia ini merupakan bentuk solidaritas antar umat beragama dan bernegara yang selama ini menjadi pedoman negara Indonesia.

*Keterangan resmi Presiden ini menanggapi permintaan dan tuntutan masyarakat agar pemerintah Indonesia berperan aktif untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di negara itu. Di awal keterangannya, Presiden Joko Widodo*

---

<sup>77</sup> Heyder Affan, "Umat Buddha Indonesia Penyumbang Terbesar Pembangunan RS di Rakhine" (15 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41268105>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

*menyatakan “Kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.”<sup>78</sup>*

Langkah pemerintah untuk turut andil menangani kasus Rohingya dilandasi atas beberapa alasan, 1) adanya hubungan bilateral (politik) antara Myanmar dan Indonesia, selain itu mereka dalam kesatuan negara ASEAN; 2) adanya rasa kemanusiaan tinggi atas konflik Rohingya; 3) tindak kejahatan Rohingya yang memanfaatkan perbedaan etnik maupun agama kontras dengan konsep keberagaman Indonesia; 4) respon atas desakan dari berbagai aksi yang digelar oleh kelompok-kelompok radikal Indonesia yang berpotensi pada perpecahan antar umat beragama di dalam negeri sendiri. Peran pemerintah Indonesia juga didasari atas kejadian yang mengharuskan warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga untuk mendapat perlindungan.

*Rakhine adalah wilayah yang ditempati mayoritas etnis Rohingya, yang belakangan meninggalkan wilayah itu untuk menyelamatkan diri ke Bangladesh, sejak pekan ketiga bulan lalu. Pengungsian besar-besaran ini terjadi menyusul aksi kekerasan yang melibatkan aparat keamanan Myanmar dan kelompok gerilyawan Rohingya, yang menamakan diri Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).<sup>79</sup>*

### **3. Moral Judgment**

Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, maka dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Dalam perangkat framing Entman langkah ketiga adalah memberikan pilihan moral. Elemen ini dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang dibuat (Eriyanto,

---

<sup>78</sup> Mohammad Susilo, “Langkah nyata Indonesia ‘Bisa Redam Radikalisme Yang Manfaatkan Isu Rohingya’”, *BBC Indonesia*, (21 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41347697>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>79</sup> Berita mengenai “Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar ‘Hentikan dan Cegah Kekerasan’ (3 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41140890>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

2012: 226). Ada beberapa serangkaian penilaian moral yang mendukung pendefinisian dan penyebab masalah dalam media online *BBC Indonesia*, baik terkait penilaian moral atas kasus Rohingya, citra Myanmar, maupun penilaian atas peran Indonesia (baik masyarakat dan pemerintah) dalam menangani kasus tersebut.

*Pertama*, kasus Rohingya dinilai sebagai tragedi yang tidak berperikemanusiaan. Kekerasan yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya telah mencederai perikemanusiaan.

Para peserta aksi dari berbagai lintas profesi saat menyerbu gedung kedubes Myanmar menilai bahwa kasus yang menimpa Rohingya adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Aksi solidaritas ditujukan untuk mengecam pemimpin *de facto* sekaligus konselor negara, Aung San Suu Kyi, karena tidak menghentikan pembantaian yang terjadi di negaranya. Suu Kyi yang awalnya dinyatakan sebagai representasi ‘Perempuan Perdamaian’ dengan meraih nobel perdamaian dari PBB pada tahun 1991, namun dikecam sebagai ‘*The Inhuman Lady*’ yang berarti dia dianggap sebagai ‘perempuan tidak berperikemanusiaan’ dan tidak bertanggungjawab atas tragedi Rohingya. Kecaman ini datang dari peserta demo yang membawa poster pernyataan tersebut. Selain itu, mereka menuntut pemenjaraan terhadap Suu Kyi dan pengusiran Dubes Myanmar dari Indonesia. Kecaman tersebut juga disertai pembakaran poster bergambar Suu Kyi. Dalam berita “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’” (2 September 2017) membingkai Suu Kyi sebagai aktor (dalang) di balik tragedi Rohingya, Myanmar.

*Para pendemo, yang terdiri dari sejumlah pemuda, pria paruh baya, hingga ibu rumah tangga, membawa sejumlah poster bertuliskan ‘Usir Dubes Myanmar’ dan ‘Penjarakan Kembali Aung San Suu Kyi’. Mereka memakai busana serbaputih dan atribut muslim. Bahkan, ada sebuah poster bergambar Aung San Suu Kyi dilengkapi deretan aksara berbunyi ‘The Inhuman Lady’ (perempuan yang tak berperikemanusiaan). Dalam aksi tersebut, para pendemo membakar*

*poster bergambar Suu Kyi sebagai ungkapan kekecewaan terhadap mantan aktivis politik yang kini menjadi pejabat pemerintah Myanmar. Pembakaran itu diikuti dengan teriakan “Hidup umat muslim sedunia”.*<sup>80</sup>

Kecaman atas pembantaian militer Myanmar terhadap etnik Rohingya juga direspon oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menilai bahwa kekejaman dan kekerasan yang dialami oleh muslim Rohingya harus segera dihentikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi di hadapan beberapa wartawan dalam pers terkait akses kemanusiaan yang telah diberikan pemerintah Indonesia. Selain mengirimkan bantuan langsung terhadap pengungsi baik di Bangladesh maupun Myanmar, pemerintah juga memberikan bantuan bagi pengungsi di Indonesia. Pengungsian yang telah disediakan pemerintah Indonesia dianggap sebagai bantuan terbaik kepada warga Rohingya.

*Indonesia juga telah menampung pengungsi dari enis Rohingya yang disebut Jokowi telah diberikan “bantuan yang terbaik” (...). Di akhir keterangan persnya, Presiden Jokowi kemudian menegaskan: “Sekali lagi, kekerasan dan krisis kemanusiaan. (di Myanmar ini harus segera dihentikan.”*<sup>81</sup>

Kedua, ketidakperikemanusiaan ini juga menjadi *moral judgment* bagi pemerintah Myanmar, terutama bagi Suu Kyi sebagai konselor negara (pemimpin *de facto*). Stigma negatif didapat oleh Aung San Suu Kyi, karena dia dianggap sebagai *rule model* perempuan perdamaian, namun tidak merepresentasikan atas penghargaan yang telah diperolehnya.

---

<sup>80</sup> Berita mengenai “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’” (2 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41134150>, diakses pada tanggal 11 September 2018

<sup>81</sup> Berita mengenai “Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar ‘Hentikan dan Cegah Kekerasan’ (3 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41140890>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

Kegagalan Aung San Suu Kyi dalam melindungi warga Rohingya dari pembantaian militer Myanmar juga direspon langsung oleh Yanghee Lee (pelapor khusus HAM PBB untuk Myanmar). Yanghee Lee menilai bahwa Suu Kyi dianggap gagal bertanggungjawab sebagai seorang konselor negara atas kasus ini. Sebagaimana pernyataan sebelumnya, Suu Kyi juga dianggap tidak mampu merepresentasikan nobel perdamaian yang telah diterima. Posisi Suu Kyi memang dianggap sulit namun kepasifannya karena tidak mengecam kekerasan juga dianggap salah. Yanghee menilai bahwa sebagai pemimpin *de facto* Suu Kyi seharusnya wajib bertindak untuk menangani kasus ini. Warga Rohingya memiliki hak untuk dilindungi secara yuridisnya, namun hal ini menjadi titik kegagalan Suu Kyi dalam menjalankan amanahnya sebagai penasehat negara dan tidak bertanggungjawab atas nobel yang diraihinya.

*Lee menyadari bahwa Aung San Suu Kyi berada dalam posisi yang sulit namun tetap mengkritiknya karena tidak mengecam kekerasan. “Pemimpin de facto perlu bertindak... Itulah yang kita harapkan dari setiap pemerintah, untuk melindungi setiap orang dalam yuridiksinya. Dia terperangkap antara batu dan tempat yang keras, namun saya kira saatnya baginya untuk ke luar dari sana sekarang.”<sup>82</sup>*

Tragedi ini juga direspon oleh Malala Yousafzai sebagai rekan Suu Kyi yang juga menerima nobel perdamaian dari PBB. Malala sendiri masih menunggu respon Suu Kyi untuk mengecam kekerasan terhadap militer Myanmar dan segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembantaian. Tragedi ini dinilai sebagai perlakuan yang tidak bermoral dan sebagai sesuatu yang ‘tragis dan memalukan’.

*Sementara itu pegiat pendidikan peraih Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai, menulis pesan di Twitter bahwa dia masih menunggu Aung San Suu Kyi—sesama rekan peraih Nobel*

---

<sup>82</sup> Berita mengenai “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi” (4 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41147802>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

*Perdamaian—untuk mengancam kekerasan. Menurutnya, perlakuan atas warga Rohingya itu sebagai sesuatu yang ‘tragis dan memalukan’.*<sup>83</sup>

*Judgment* ini juga berdampak pada citra Myanmar sebagai negara berdaulat dan multi-keagamaan. Artinya, tidak ada agama negara yang resmi di Myanmar, namun agama mayoritas adalah Buddha Theravada.<sup>84</sup> Stigma negatif datang dari berbagai negara di ASEAN, terutama Indonesia. Indonesia menganggap bahwa Myanmar tidak merepresentasikan negara yang berperikemanusiaan. Tanggapan ini tidak hanya datang dari pemerintah Indonesia, namun juga masyarakat Indonesia secara luas. Beberapa muslim yang tergabung dalam alumni gerakan aksi 212 memprotes keras tindakan militer Myanmar dan menggelar aksi di sekitar Candi Borobudur untuk menyatakan solidaritas kemanusiaan. Beberapa dari mereka menilai bahwa tindakan Myanmar terlampaui kejam. Koordinator aksi Anang Imaduddin menilai bahwa tragedi kemanusiaan ini lebih besar dibanding kasus penistaan agama Islam di Indonesia.

*“Ini hasil dari gelombang perasaan yang sama, saya pikir saya cukup optimis, kemarin saya ditelpon itu menangis, dari berbagai penjuru telepon saya mereka membayangkan kekejaman itu apabila itu terjadi kepada orang tuanya kepada anaknya. Mereka tergerak untuk benar-benar memprotes ini,”* papar Anang. *“Sehingga magnet ini sangat kuat, bahkan ini bisa lebih kuat dari magnet ketika Ahok hanya menghina Al-quran waktu itu.”* *“Ini sudah kejahatan kemanusiaan dan ini riil terjadi pembantaian yang biadab. Besar tidaknya saya kira relatif juga. Semua porsi masing-masing, kalau itu kan Al quran juga, saa juga tidak bisa mengatakan bahwa Alquran lebih tidak lebih*

---

<sup>83</sup> “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi” (4 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41147802>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>84</sup> Bureau of Democracy, Human Right, and Labor. 2009. “2008 Country Reports on Human Rights Practices” . (25 Februari 2009). <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/eap/119035.htm> diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

*penting dari pembantaan. Tapi ini magnet yang besar juga untuk orang berpartisipasi.” aku Anang.<sup>85</sup>*

*Ketiga*, penilaian atas peran Indonesia dalam kasus Rohingya dan Meningkatnya aktivitas radikalisme yang terjadi dengan memanfaatkan isu Rohingya. Meningkatnya aktivitas radikalisme dapat menimbulkan permasalahan yang baru.

Kasus Rohingya yang mendapatkan perhatian cukup besar dari masyarakat Indonesia. Akan tetapi, tidak jarang juga yang memanfaatkan tragedi kemanusiaan ini untuk kepentingan kelompoknya. Salah satunya adalah kelompok-kelompok garis keras di Indonesia. Peningkatan aktivitas radikalisme berdampak pada stabilitas keamanan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Peningkatan aktivitas radikalisme dirasakan baik di media sosial maupun kehidupan nyata. Selain itu tindak anarki juga terjadi saat aksi solidaritas digelar di depan gedung kedubes Myanmar.

Demonstrasi yang dilakukan pada 4 September 2017 itu memicu aksi dorong-dorongan antara mahasiswa yang tergabung dalam Hima Persis dan polisi. Aksi ini dinilai terlalu emosional tanpa memberikan kontribusi yang nyata. Hal ini dinyatakan oleh sekretaris *International Concern Group for Rohingyas* (ICGR), Adli Abdullah. Adli aktif mengirimkan bantuan kepada warga Rohingya di Myanmar sejak tahun 2010. Penilaian Adli terhadap aksi yang cenderung anarkis malah akan berakibat buruk bagi warga Rohingya. Jika aksi anarkis itu tetap dibiarkan, kemungkinan besar Myanmar tidak akan percaya kepada Indonesia dan menutup akses pengiriman bantuan. Peningkatan aktivitas radikalisme semacam ini malah akan berbahaya bagi warga Rohingya. Aksi yang mereka gelar pun rata-rata memanfaatkan nama

---

<sup>85</sup> Berita mengenai “Aksi Ormas Islam Dekat Borobudur: “Magnet Rohingya Bisa Lebih Besar dari Kasus Ahok””, *BBC Indonesia*, (6 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41170631>, diakses pada tanggal 11 November 2018

‘solidaritas keagamaan’, sedangkan tragedi yang berlangsung di Rakhine juga menyangkut dua benturan agama yang berbeda. Aktivitas ini akan berdampak baik bagi Indonesia maupun Rohingya dan Myanmar.

*Adli Abdullah, sekretaris International Concern Group for Rohingyas (ICGR) –sebuah LSM membatu warga Rohingya—juga berpendapat demonstrasi yang belakang terjadi mengarah pada ‘aksi emosional’. “Yang dipakai emosi rakyat meluap. Ini ka akhirnya kontraproduktif, karena tidak nyampe ke sana (Myanmar).” Menurut Adli Abdullah –yang sejak 2010 aktif mengirimkan bantuan kepada warga Rohingya di Myanmar—aksi cenderung anarkis malah bisa berakibat buruk. “Bisa saja nanti (pemerintah Myanmar) jadinya malah menutup akses bantuan dari Indonesia,” kata Adli.<sup>86</sup>*

Sementara itu peningkatan aktivitas radikalisme banyak ditemukan di media sosial, yakni dengan munculnya akun-akun yang menyerukan jihad untuk membela Rohingya. Akun ini muncul dari para pendukung ISIS di Indonesia. Mereka kerap mengunggah konten untuk mempromosikan ISIS dan Al Qaida. Akun-akun ini dikategorikan sebagai akun yang mendukung gerakan global Islam radikal sedang penggolongan kedua adalah akun-akun yang mendukung gerakan garis keras di Indonesia. Akun-akun yang digunakan untuk menggaungkan jihad adalah instagram, facebook, dan twitter. Gerakan radikal di media sosial memanfaatkan ‘tagar’ dan opsi ‘share’ untuk melancarkan aksinya. Di sisi lain, FPI membuka perekrutan milisi sebagai relawan jihad bagi Rohingya dan akan dikirim ke Myanmar dengan mendirikan pos pendaftaran bagi relawan. Kelompok-kelompok tersebut satu suara dalam menyerukan perlunya jihad ke Myanmar untuk membantu warga Rohingya.

Aktivitas radikalisme ini malah dinilai menciderai solidaritas kemanusiaan yang dibangun oleh Indonesia kepada Myanmar. Radikalisasi ini

---

<sup>86</sup> Rafki Hidayat, “Kekerasan Rohingya: Apa yang Harus Dilakukan Warga Indonesia” (5 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144847>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

tidak hanya berdampak pada muslim Rohingya yang di Myanmar karena kemungkinan tertutupnya akses bantuan kepada mereka, namun juga berdampak pada kerukunan umat beragama di Indonesia. Seruan tersebut menjadi kombinasi yang berbahaya karena perbedaan antara gerakan islam radikal global dan lokal menjadi tipis. Mereka memainkan tagar dengan hashtag #jihad, #fpi, #relawan, #Arsa (mengacu pada tentara militan islam di Myanmar), #relawan, dsb. Hal ini dikhawatirkan sebagai ladang perekrutan anggota ISIS, karena seruan-seruan tersebut sudah tidak dapat dibedakan dalam platform media sosial. Selain itu, aktivitas tersebut dapat meningkatkan gerakan radikalisme di Asia Tenggara.

*Akun-akun pendukung garis keras di Indonesia 'setuju dengan seruan tersebut' dan menulis 'ayo tunjukkan kekuatanmu wahai mujahidin dan milisi Islam di Asia Tenggara, bantulah saudaramu Rohingya yang tengah ditindas.' Unggahan di media sosial ini banyak dibagikan oleh akun-akun garis keras. (...). Satu akun pro-Al Qaida menulis 'senjata kami memang tak secanggih militer Myamar.... tapi kita punya Allah dan kami siap membela Allah dengan nyawa kami'. Akun yang menulis 'wahai saudaraku Rohingya, jihad ada di jalanmu' dilihat 76.000 kali.<sup>87</sup>*

Tindakan radikal ini tidak dibenarkan dan dianggap dapat menghambat bantuan bagi warga Rohingya. Bagi mereka kelompok-kelompok garis keras jihad merupakan aksi membela kaum Rohingya dari ketertindasan, sebaliknya, tindakan mereka malah akan membahayakan bagi keberlangsungan hidup warga Rohingya karena akan semakin ditekan oleh Myanmar. Gerakan radikal ini direspon cepat oleh pemerintah yang memberikan langkah nyata untuk membantu warga Rohingya, baik mereka yang masih di Myamar, maupun pengungsi di Bangladesh dan Indonesia. Jokowi sendiri sebagai presiden Indonesia dalam keterangan persnya menyatakan bahwa Rohingya lebih

---

<sup>87</sup> Berita mengenai "Krisis Rohingya 'menyatukan' kelompok-kelompok garis keras di Indonesia", *BBC Indonesia*, (20 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41334082>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

membutuhkan aksi nyata dibanding kecaman-kecaman semata. Indonesia pun tidak membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh Myanmar, namun bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk material, Indonesia turut andil dalam memberikan bantuan diplomatis, akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan sinergi antara pemerintah Indonesia, LSM, masyarakat sipil, organisasi-organisasi keagamaan, hingga dunia internasional. Pemerintah Indonesia tidak hanya berpengaruh besar pada keberlangsungan hidup warga Rohingya. Pemerintah juga berhasil meredam aktivitas radikalisme yang meningkat di Indonesia akibat konflik Rohingya. Menurut pengamatan Philips Vermonte (pengamat politik Asia Tenggara) dari lembaga pemikir CSIS di Jakarta, menilai bahwa peran pemerintah Indonesia berpengaruh besar terhadap pemberhentian dan pencegahan kekerasan di Rakhine, Myanmar. Diplomasi Indonesia kepada pemerintah Myanmar sangat penting untuk menciptakan suasana kondusif bagi warga Rohingya. Indonesia memiliki modal untuk didengar Myanmar, karena Indonesia banyak membantu politik dan demokrasi Myanmar. Bantuan yang diberikan Indonesia juga sebagai salah satu 'kartu' untuk membangun jalinan diplomasi antar dua negara. Bantuan Indonesia sangat berpengaruh dan berdampak simbolik bagi Myanmar. Dari sini dapat dilihat bahwa aksi solidaritas diperbolehkan asal menghindari tindak anarkis maupun radikalisme agama, karena sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan langkah nyata yang memiliki pengaruh besar bagi Rohingya dan diplomasi Myanmar.

*“Indonesia negara yang berpengaruh di Asia Tenggara. Biasa dianggap teman Kalau Indonesia meninggalkan Myanmar, dampaknya bisa rumit bagi Myanmar,” tutur Philips. Menurut Philips, Anda*

*membantu pemerintah Indonesia untuk menekan Myanmar dan salah satunya adalah dengan 'lewat berdemo tanpa kekerasan'.*<sup>88</sup>

Umat Buddha di Indonesia turut memberikan bantuan kepada warga Rohingya sebagai korban kekerasan di Rakhine Myanmar. Tindakan yang diambil oleh umat Buddha merupakan teladan dan representasi baik bagi solidaritas dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Bantuan yang mereka berikan juga dengan tujuan untuk mengurangi beban umat Islam yang berada dalam kondisi berbahaya di Myanmar. Melalui bantuannya yang diorganisir oleh Walubi, Umat Buddha Indonesia merepresentasikan jiwa kemanusiaan yang besar. Mereka memiliki ketulusan hati untuk membantu dengan jiwa kemanusiaan yang besar walaupun mereka berbeda agama.

*“Kami mengajak masyarakat dermawan agar tulus dan serius mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk mengurangi beban hidup umat Islam dalam kondisi saat ini di sana,” kata Paulus Misjuwar, pegiat Walubi. Sejauh ini, umat Buddha di Indonesia telah menyumbangkan uang sebesar US\$1 juta atau sekitar RP 10 miliar untuk membiayai pembangunan rumah sakit di Myanmar tersebut, ungkap pelaksana harian Ketua umum Palang Merah Indonesia, PMI, Ginandjar Kartasasmita.(...). Menurutnya, bantuan uang dari umat Buddha di Indonesia ini merupakan contoh baik dalam kerukunan umat beragama di Indonesia.*<sup>89</sup>

BBC mengambil keputusan moral mengenai pemberitaan kasus Rohingya dan peran Indonesia dalam menangani kasus tersebut dalam 3 sudut pandang secara umum. Pertama, dari sudut pandang kasus itu sendiri. Kedua, dampak kasus terhadap citra Myanmar dan citra Aung San Suu Kyi. Ketiga, peran Indonesia dalam merespon dan menangani kasus Rohingya. Dari awal

---

<sup>88</sup> Rafki Hidayat, “Kekerasan Rohingya: Apa yang Harus Dilakukan Warga Indonesia” (5 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144847>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>89</sup> Heyder Affan, “Umat Buddha Indonesia Penyumbang Terbesar Pembangunan RS di Rakhine” (15 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41268105>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

pemberitaan BBC menekankan bahwa kasus pembantaian warga Rohingya adalah tindakan tak bermoral dan tak berperikemanusiaan, apapun alasan yang mendasari pembantaian tersebut. Terlepas dari konflik antar etnik yang berbeda dan serangan balik yang dilakukan oleh tentara Arsa, sejauh ini tindakan militer Myanmar dianggap sama sekali tidak berperikemanusiaan.

Pembantaian ini akhirnya berdampak pada citra Myanmar yang dianggap tidak mampu melindungi warganya, walaupun hanya secara yuridis. BBC mengabaikan latar belakang Rohingya sebagai warga negara ilegal, Myanmar tetap dianggap bersalah. Hal ini juga berdampak pada citra Aung San Suu Kyi. Suu Kyi dinilai pasif tidak mengecam kekerasan hingga mengambil tindakan untuk menghentikan pembantaian. Jabatannya sebagai pemimpin *de facto*/ konselor negara tidak menunjukkan pertanggungjawaban seorang pemimpin. Di sisi lain, Suu Kyi kehilangan citranya sebagai perempuan perdamaian yang dinobatkan oleh PBB pada tahun 1991. Dia dinilai sebagai 'Inhuman Lady' atau 'perempuan tidak berperikemanusiaan'. Hal ini mendapat kecaman dan kritik dari dunia internasional.

Indonesia sebagai negara berpengaruh di Asia Tenggara turut merespon kasus yang menimpa Rohingya. *BBC Indonesia* cenderung menekankan pemberitaan mengenai respon dan peran pemerintah maupun masyarakat Indonesia dalam menanggapi kasus Rohingya dibanding sejarah kasus itu sendiri. Langkah nyata pemerintah dianggap sebagai keputusan moral yang luar biasa untuk memberi teladan keberagaman bagi Myanmar maupun negaranya sendiri. Langkah itu juga tidak terlepas dari desakan gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia yang memanfaatkan isu Rohingya. Selain itu, pemerintah mampu membangun sinergi dengan LSM dan organisasi berbagai elemen dari Indonesia. *BBC Indonesia* kemudian menghadirkan keputusan moral melalui penggambaran umat Buddha Indonesia yang turut membantu warga Rohingya. Hal ini ditampilkan untuk merepresentasikan ketulusan mereka walaupun dari agama yang berbeda.

Secara keseluruhan *BBC Indonesia* membingkai *moral judgment* mengarah pada roda radikalisme yang sedang dijalankan kelompok garis keras di Indonesia. Peran pemerintah di sini sebenarnya ditujukan tidak hanya untuk menangani kasus Rohingya saja, tetapi juga tindakan radikalisme di Indonesia yang mengatasnamakan jihad atas Rohingya. Bentuk radikalisme seperti ini sebenarnya tidak membantu Rohingya sama sekali, karena tindakan yang mereka nyatakan akan lebih membahayakan bagi Rohingya. Tindakan radikalisme tersebut secara tidak langsung juga mencederai kasus kemanusiaan dengan mengatasnamakan solidaritas agama, karena diimplementasikan hanya melalui demo yang berpotensi pada tindak anarkis dan ajakan jihad di media sosial yang mengarah pada perekrutan militansi ISIS.

#### 4. Treatment Recommendation

*Treatment recommendation* dalam *BBC Indonesia* terkait pemberitaan isu Rohingya ditekankan pada langkah nyata dan peran pemerintah maupun beberapa organisasi kemanusiaan maupun masyarakat Indonesia dalam mengatasi konflik Rohingya. *Treatment recommendation* merupakan elemen keempat dari teori framing Entmann mengenai penekanan masalah (pemberian solusi).<sup>90</sup> Di setiap pemberitaan *BBC Indonesia* mengenai kasus Rohingya periode september, BBC kerap menampilkan peran pemerintah dalam merespon kasus Rohingya.

Peran ini diimplementasikan dengan kerjasama antara pemerintah dengan LSM, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, hingga masyarakat umum. Sinergi yang diciptakan pemerintah untuk memberikan aksi nyata dan solusi agar tidak berakhir pada kecaman semata. Peran tersebut kemudian diberikan dalam bentuk bantuan-bantuan. Bantuan

---

<sup>90</sup> Eriyanto, "Robert N. Entmann" dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm 227.

pemerintah Indonesia dikategorikan dalam tiga jenis, diantaranya berupa i) bantuan diplomatis; ii) bantuan kemanusiaan, berupa akses kesehatan, pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan dukungan moral ; iii) bantuan pengungsian di negara Indonesia sendiri.

Sasaran ditujukan mencakup warga Rohingya yang masih di Myanmar, pengungsi di Bangladesh, pengungsi di Indonesia. Selain itu bantuan juga menyoasar umat Buddha di Rakhine. Bantuan yang diberikan pemerintah murni atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan sasaran. Sementara itu BBC membingkai berita bahwa tujuan bantuan tidak hanya mengatasi permasalahan yang dihadapi warga Rohingya, namun juga untuk mengatasi peningkatan aktivitas radikalisme yang digambarkan kelompok garis keras di Indonesia, yang juga memanfaatkan kasus Rohingya. Langkah nyata pemerintah dianggap tepat untuk mengatasi kedua permasalahan utama tersebut.

Pada pemberitaan BBC yang diterbitkan tanggal 2 September 2017 dengan judul “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’” nampak bahwa pemerintah memberikan bantuan diplomatis kepada warga Rohingya melalui Menlu Retno Marsudi. Menlu Retno menemui langsung pemerintah Myanmar untuk segera memberi perlindungan terhadap warga Rohingya. Hal ini juga dilakukan untuk memulihkan stabilitas keamanan di Rakhine yang mampu berdampak pada dunia internasional.

*Lepas dari seruan itu, pemerintah Indonesia telah mendorong Myanmar untuk segera memulihkan stabilitas keamanan di Rakhine dan meminta semua pihak menahan diri. Pada 31 Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan berkomunikasi dengan pemerintah Myanma agar negara itu dapat memberikan*

*perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine, termasuk komunitas Islam.*<sup>91</sup>

Di balik itu kecaman terus datang dari beberapa ormas Islam di Indonesia. Beberapa orang yang mengaku dalam perkumpulan lintas profesi yang melakukan aksi di depan gedung kedubes Myanmar, selain menyatakan aksi solidaritas, juga bertujuan mendesak pemerintah Indonesia untuk tegas bersuara. Pandangan kontras ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh ataupun bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Melihat kondisi mutakhir perpolitikan Indonesia yang saling berbenturan antara pemerintah dengan ormas Islam oposisi.

*Irfan juga mendorong agar pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap Myanmar.*

*“Indonesia harus bersuara. Kejahatan kemanusiaan tidak patut dilakukan ketika ingin mempertahankan kekuasaan. Pemerintah Indonesia harus proaktif terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh siapapun di dunia ini, bukan hanya Myanmar. Myanmar adalah yang terdekat,” sebutnya.*<sup>92</sup>

Bentuk bantuan diplomatis juga dinampakan dalam pemberitaan BBC “Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar ‘Hentikan dan Cegah Kekerasan’” (3 September 2017). Keberangkatan Menlu Retno ke Myanmar untuk bernegosiasi dinyatakan presiden dalam keterangan persnya pada 3 september malam hari di Istana Merdeka. Tujuan diplomasi tidak lain untuk menghentikan dan mencegah kekerasan di Rohingya. Pemerintah juga menekan Myanmar untuk melindungi muslim di Myanmar.

---

<sup>91</sup> Berita mengenai “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’” (2 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41134150>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

<sup>92</sup> Berita mengenai “Di Depan Kedutaan Myanmar, Demonstran Kecam ‘Kejahatan terhadap Rohingya’” (2 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41134150>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

*Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya telah menugaskan Menteri luar negeri Retno Marsudi untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan di wilayah negara itu. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (03/09) malam. Menlu Retno sendiri telah berangkat ke Myanmar pada Minggu sore. “Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanma agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga, termasuk Muslim di Myanmar,” kata Presiden.<sup>93</sup>*

Dalam berita tersebut juga memberitahukan bahwa keberangkatan Menlu Retno juga untuk membuka akses kemanusiaan bagi warga Rohingya, sebagaimana perintah dari Presiden RI. Bantuan ini diberikan mengingat pengungsian besar-besaran yang dilakukan warga Rohingya ke Bangladesh pasca pembantaian oleh militer Myanmar yang tersulut karena tindakan Arsa yang menyerang pos dan pangkalan mereka.

Dalam pemberian bantuan pemerintah bersinergi dengan masyarakat sipil dan dunia Internasional. Pada pemberitaan “Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar ‘Hentikan dan Cegah Kekerasan’” (3 September 2017) ini juga, Presiden Jokowi menugaskan Menlu Retno untuk berkomunikasi secara intensif dengan Antonio Guterres sebagai Sekjen PBB dan Kofi Annan yang menjabat sebagai *Advisory Commission on Rakhine State*. Bantuan kemanusiaan juga diberikan pemerintah Indonesia dalam bentuk kebutuhan materi, kesehatan, dan akses pendidikan bagi warga Rakhine maupun Rohingya yang di Bangladesh.

*“Ini di bulan Februari dan Januari, sebanyak 10 kontainer,” ungkapnya. Presiden juga menyatakan bahwa Indonesia telah membangun sekolah di Rkachine State.” Dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai pada bulan Oktober.” Indonesia juga telah menampung pengungsi dari etnis Rohingya yang*

---

<sup>93</sup> Berita mengenai “Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar ‘Hentikan dan Cegah Kekerasan’ (3 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41140890>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

*disebut Jokowi telah diberikan “Bantuan yang terbaik.” “Saya juga menugaskan Menlu untuk terbang ke Dhaka, Bangladesh, dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi yang berada di Bangladesh,” jelasnya.<sup>94</sup>*

Pada pemberitaan “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi” (4 September 2017) BBC mencatat kedatangan Menlu Retno di Myanmar untuk menemui Suu Kyi pada hari senin tanggal 4 September 2017). Bantuan diplomatis yang diberikan oleh Menlu Retno diberikan dalam bentuk mirip perjanjian. BBC mengacu pada pernyataan pers tertulis dari Kementerian Luar Negeri. Menlu Retno memberikan formula bagi Myanmar dalam rumusan 4+1, adalah sebagai berikut.

*Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan usulan yang disebut Formula 4+1 untuk Negara Bagian Rakhine, berupa:*

- 1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan*
- 2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan.*
- 3. Perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama*
- 4. Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.<sup>95</sup>*

Elemen keempat itu dianggap sebagai elemen utama agar kondisi Rohingya tidak memburuk. Sementara itu elemen kelima, yakni dinyatakan BBC dalam berita sebagai berikut:

*Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan komisi Penasihat untuk Negara Bagian Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.<sup>96</sup>*

---

<sup>94</sup> Ibid, “Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar...”.

<sup>95</sup> “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi” (4 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41147802>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>96</sup> Ibid, “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi”.

Dalam pertemuan juga menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia dan ASEAN juga bekerjasama dalam bantuan kemanusiaan yang melibatkan ICRC juga.

Pada pemberitaan BBC Indonesia berjudul “Kekerasan Rohingya: Apa yang Harus Dilakukan Warga Indonesia?” (5 September 2017) pemerintah Indonesia bersinergi dengan LSM PKPU *Human Initiative* mengirimkan bantuan berupa obat-obatan dan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti susu, makanan, mie instan, pakaian, pampers bayi. Menlu RI juga meresmikan organisasi yang menaungi bantuan bagi Rohingya dalam Aliansi Kemanusiaan untuk Myanmar (AKIM). Mereka terdiri dari 11 lembaga, seperti PKPU, Muhammadiyah, NU, ACT, dan lain-lain.

*Tomy Hendrajati, Direktur Program PKPU, sebuah LSM yang membantu etnis Rohingya di Myanmar, mengungkapkan ‘kebutuhan dasar seperti makanan, mie instan, pakaian, susu dan pampers untuk bayi’ adalah yang paling dibutuhkan warga Rohingya di wilayah Rakhine yang tengah berkonflik. “Mereka itu mendapatkan kebutuhan tersebut dari bantuan. Akses kesehatan juga (dari bantuan),” ungkap Tomy kepada BBC Indonesia, Senin (04/09).<sup>97</sup>*

Program bantuan oleh Aliansi Kemanusiaan untuk Myanmar (AKIM) sebesar US\$2 juta diberikan ke tempat-tempat pengungsian yang menampung lebih sekitar 500.000 orang di Sittwe. Bantuan ini diberikan dalam bentuk akses pendidikan dan infrastruktur di Sittwe, Rakhine.

*“Kami siapkan training guru, perbaikan fasilitas umum... Sekarang kami juga merenovasi 20 unit penampungan yang bisa menampung 200 keluarga di Sittwe,” ungkapnya.<sup>98</sup>*

---

<sup>97</sup> Rafki Hidayat, “Kekerasan Rohingya: Apa yang Harus Dilakukan Warga Indonesia” (5 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144847>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>98</sup> Rafki Hidayat, *Ibid.*

Pada berita “Aksi Ormas Islam Dekat Borobudur: “Magnet Rohingya Bisa Lebih Kuat dari Kasus Ahok” (6 September 2017), BBC juga menyoroti beberapa orang yang tergabung dalam alumni gerakan 212 menggelar aksi dengan melakukan penggalangan dana untuk Rohingya. Demonstrasi yang sempat dilarang oleh anggota kepolisian Jawa Tengah ini juga memberikan nilai positif atas keterlibatannya dalam membantu baik dalam bentuk spiritualitas (doa) maupun bantuan kemanusiaan melalui penggalangan dana.

*Kepada BBC Indonesia, koordinator aksi Anang Imanuddin mengatakan mereka akan melakukan salat Jumat bersama di Masjid An Nur, dua kilometer dari kompleks candi, untuk selanjutnya melakukan doa bersama, tausiyah dan penggalangan dana.<sup>99</sup>*

Pada berita BBC “Diangkut Empat Pesawat Hercules, RI Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya” (13 September 2017), bantuan kemanusiaan resmi dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo bagi warga Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar. Bantuan pertama ini berupa kebutuhan pokok (primer) bagi warga Rohingya.

*Bantuan kemanusiaan itu—antara lain berupa beras, makanan siap saji, tangki air, tenda, pakaian anak dan selimut seberat sekitar 34 ton—diangkut dengan empat pesawat Hercules TNI dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (Rabu/09) pagi. “Ini adalah pemberangkatan yang pertama. Insya Allah, minggu depan akan diberangkatka (bantuan) yang kedua, ketiga, dan seterusnya,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya. (Dalam berita “Diangkut Empat Pesawat Hercules, RI Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya”, BBC Indonesia, 13 September 2017).*

Dalam keterangan persnya, Menlu Retno menyatakan bahwa bantuan yang dikirimkan ke Bangladesh juga melibatkan pengusaha dan ormas. Bantuan juga akan didistribusikan ke Chittagong dan Cox’s Bazar, Bangladesh.

---

<sup>99</sup> Berita mengenai “Aksi Ormas Islam Dekat Borobudur: “Magnet Rohingya Bisa Lebih Besar dari Kasus Ahok””, *BBC Indonesia*, (6 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41170631>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

*Dikatakan, selain dari pemerintah, bantuan ini berasal dari ormas serta kalangan pengusaha. Dalam keterangan sebelumnya, Menlu Retno Marsudi mengatakan bantuan itu rencananya akan diterbangkan ke Chittagong, Bangladesh. Setelah itu, bantuan kemanusiaan tersebut akan didistribusikan ke Cox's Bazar, tempat lokasi pengungsian, yang jaraknya sekitar 170 kilometer dari Chittagong.<sup>100</sup>*

Selain pengusaha dan ormas, umat Buddha Indonesia turut andil membantu warga Rohingya melalui organisasi walubi. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan rumah sakit di wilayah Mrak-U yang mendapatkan sokongan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari umat Buddha Indonesia. Pada pemberitaan BBC dalam “Umat Buddha Indonesia Penyumbang Terbesar Pembangunan RS di Rakhine” (15 September 2017) menggambarkan bahwa umat Buddha memberikan contoh kerukunan umat beragama yang menjadi representasi dari keberagaman Indonesia. Walaupun tragedi Rohingya menimpa umat muslim, mereka tetap membantu dengan landasan solidaritas keagamaan.

*Pembangunan rumah sakit bantuan masyarakat Indonesia di negara bagian Rakhine, Myanmar, terus dilanjutkan, walaupun di wilayah itu terjadi kekerasan yang menyebabkan pengungsian besar-besaran warga Rohingya. Rumah sakit itu dibangun atas inisiatif organisasi Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) Indonesia, sejak lima tahun lalu, dan mendapat sokongan dana dari masyarakat, terutama dari umat Buddha di Indonesia.<sup>101</sup>*

Pembangunan rumah sakit pun dilakukan pemerintah atas dukungan dan melibatkan berbagai pihak. Dana juga disalurkan terutama dari umat Buddha Indonesia. Pembangunan rumah sakit ini atas persetujuan dari pemerintah

---

<sup>100</sup> Berita mengenai “Diangkut Empat Pesawat Hercules, RI Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya” (13 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41250030>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>101</sup> Heyder Affan, “Umat Buddha Indonesia Penyumbang Terbesar Pembangunan RS di Rakhine” (15 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41268105>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

Myanmar dengan tujuan untuk menjembatani dua kelompok yang sedang berkonflik agar tidak mengarah pada perpecahan.

*Dana dari masyarakat Indonesia untuk membangun rumah sakit itu, sejauh ini, terus mengalir, termasuk sumbangan uang dari umat Buddha di Indonesia, melalui organisasi Walubi.<sup>102</sup>*

BBC juga merilis pernyataan Ginandjar Kartasasmita (ketua PMI Indonesia) dalam berita tersebut mengenai jumlah uang yang disumbangkan oleh umat Buddha Indonesia. Hal ini menunjukkan kesungguhan umat Buddha tidak remeh dalam membantu warga muslim Rohingya.

*Sejauh ini, umat Buddha di Indonesia telah menyumbang uang sebesar US\$ 1 juta atau sekitar Rp 10 miliar untuk membiayai pembangunan rumah sakit di Myanmar tersebut, ungkap Pelaksana harian Ketua umum Palang Merah Indonesia, PMI, Ginandjar Kartasasmita. “Dari US\$1,9 juta yang dibutuhkan (untuk membangun rumah sakit), ada sumbangan US\$1 juta dari masyarakat Buddha Indonesia, Walubi, yang sudah PMI terima,” kata Ginandjar.<sup>103</sup>*

BBC Indonesia dalam pemberitaan mengenai kasus Rohingya lebih menyoroti radikalisme di Indonesia sebagai dampak pemanfaatan isu oleh kelompok-kelompok garis keras pendukung ISIS. Namun partisipasi aktif pemerintah dalam memberikan berbagai bantuan diplomasi, kemanusiaan, dan pengungsian mampu meredam peningkatan aktivitas radikalisme di Indonesia. Pada pemberitaan BBC “Langkah Nyata Indonesia ‘Bisa Redam Radikalisme yang Manfaatkan Isu Rohingya’” (21 September 2017) menyatakan bahwa pemerintah sudah turut andil dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Hal ini tidak terlepas dari data yang diberikan Ansyad Mbai (mantan kepala BNPT) dalam menanggapi kajian BBC Monitoring yang

---

<sup>102</sup> Heyder Affan, Ibid.

<sup>103</sup> Heyder Affan, “Umat Buddha Indonesia Penyumbang Terbesar Pembangunan RS di Rakhine” (15 September 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41268105>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

mencatat peningkatan aktivitas radikalisme yang pecah pasca mencuatnya kasus Rohingya.

*Ansyaad mengatakan langkah pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah diplomatik dan mengirim bantuan bagi warga Rohingya yang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh ikut meredam pemanfaatan krisis ini untuk kepentingan kelompok-kelompok radikal.<sup>104</sup>*

Peran aktif pemerintah Indonesia juga mampu menghentikan rencana kelompok-kelompok garis keras untuk mengirimkan milisi jihad ke Myanmar. Selain itu langkah tanggap pemerintah memberikan dampak positif baik bagi warga Rohingya maupun bagi stabilitas keamanan Indonesia agar terhindar dari radikalisme.

*“Langkah pemerintah sudah tepat. Pemerintah Indonesia dengan cepat merespons dengan memberi bantuan terhadap para pengungsi (Rohingya), sehingga otomatis isu-isu itu akan tereliminir,” kata Ansyaad kepada BBC Indonesia, hari Kamis (21/09).<sup>105</sup>*

Pada elemen ini *BBC Indonesia* membingkai secara jelas peran Indonesia dalam mengatasi konflik Rohingya, khususnya partisipasi aktif pemerintah Indonesia. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *BBC Indonesia* untuk memperlihatkan peran aktif pemerintah Indonesia adalah salah satu bentuk upaya kritik BBC atas radikalisme di Indonesia. Di lain sisi memang BBC cenderung menyoroti aktivitas radikalisme yang memanfaatkan konflik Rohingya untuk perekrutan milisi. BBC secara konsisten menampilkan peran pemerintah di setiap berita.

---

<sup>104</sup> Mohammad Susilo, “Langkah nyata Indonesia ‘Bisa Redam Radikalisme Yang Manfaatkan Isu Rohingya’”, *BBC Indonesia*, (21 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41347697>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

<sup>105</sup> Mohammad Susilo, “Langkah nyata Indonesia ‘Bisa Redam Radikalisme Yang Manfaatkan Isu Rohingya’”, *BBC Indonesia*, (21 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41347697>, diakses pada tanggal 11 November 2018.

**Tabel 3.3 Intensitas BBC Indonesia menampilkan peran Indonesia dalam menangani kasus Rohingya**

<b>Judul</b>	<b>Representasi Peran Indonesia dalam Pendefinisian versi <i>BBC Indonesia</i></b>
“Di depan Kedutaan Myanmar, demonstran kecam ‘kejahatan terhadap Rohingya’”	<p><b>Bantuan diplomatis:</b> Negosiasi Menlu Retno dengan Pemerintah Myanmar</p>
“Presiden Jokowi meminta pemerintah Myanmar ‘hentikan dan cegah kekerasan’”	<p><b>Bantuan diplomatis:</b> Presiden mengirim Menlu Retno ke Myanmar dan Bangladesh untuk membuka akses bantuan kemanusiaan, dan menjalin komunikasi dengan sekjen PBB</p> <p><b>Bantuan kemanusiaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah bersinergi dengan masyarakat sipil dan dunia internasional;</li> <li>2. Membuka akses kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan;</li> <li>3. Mengirimkan makanan dan obat-obatan;</li> <li>4. Membangun sekolah di Rakhine State.</li> </ol>
“Menlu RI serahkan formula, pelapor khusus PBB dan Malala kritik Suu Kyi”	<p><b>Bantuan diplomatis:</b> Menlu Retno serahkan formula 4+1</p> <p><b>Bantuan kemanusiaan:</b> Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kerja sama dengan ICRC.</p>
“Kekerasan Rohingya, apa yang harus dilakukan warga Indonesia”	<p><b>Bantuan Kemanusiaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah mengirimkan makanan dan obat-obatan bekerjasama dengan LSM PKPU HI dan AKIM;</li> <li>2. Membuka hotline layanan dan rekening untuk menampung sumbangan;</li> <li>3. Penyaluran dana sebesar 2 juta US Dollar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di Sittwe, Rakhine;</li> <li>4. Kelayakan penampungan di Indonesia dirasakan oleh pengungsi.</li> </ol>

<p>“Aksi Ormas Islam di dekat Borobudur: magnet Rohingya bisa lebih kuat dari kasus Ahok”</p>	<p>Penggalangan dana dan bantuan doa dari alumni gerakan 212 di Jawa Tengah.</p>
<p>“Diangkut empat pesawat Hercules, RI kirim bantuan kemanusiaan untuk Rohingya”</p>	<p><b>Bantuan Kemanusiaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah memberikan bantuan melalui pemberangkatan pertama, yakni bahan pokok bagi warga di perbatasan Bangladesh-Myanmar, berupa beras, makanan siap saji, tangki air, tenda, pakaian anak, dan selimut seberat 34 ton;</li> <li>2. Pemerintah mempersiapkan bantuan untuk pemberangkatan bantuan kedua, ketiga, dan seterusnya.</li> <li>3. Bantuan juga didukung oleh ormas dan pengusaha.</li> </ol>
<p>“Umat Buddha Indonesia penyumbang terbesar pembangunan RS Rakhine”</p>	<p><b>Bantuan Kemanusiaan:</b></p> <p>Umat Buddha Indonesia—melalui walubi—menyumbangkan dana sebesar US\$1 juta (10 miliar) dari \$1,5 juta dana yang dibutuhkan. Penyaluran dana untuk membangun rumah sakit di bagian Mark U Rakhine.</p>
<p>“Langkah nyata Indonesia ‘bisa redam radikalisme yang memanfaatkan isu Rohingya”</p>	<p>Langka diplomatik dan peran aktif pemerintah mampu meredam peningkatan radikalisme di Indonesia dan melemahkan perlunya pengiriman milisi/ relawan jihad ke Myanmar.</p>

## 2. Pembahasan

### A. Perbandingan Framing *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia*

Pemberitaan mengenai kasus Rohingya memang menarik perhatian dunia internasional dan diberitakan oleh berbagai media. Begitu juga di Indonesia, dua

media online *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia* secara intens memberitakan kasus ini pada periode September 2017. Pemberitaan mereka selalu dititiktekan pada peran Indonesia dalam mengatasi kasus Rohingya. Hal ini muncul dari respon masyarakat Indonesia yang kuat mengenai kasus Rohingya. Setiap media memiliki aspek yang ditonjolkan dalam penerbitan sebuah berita. Menurut Eriyanto kemenonjolan berita merupakan produk interaksi antara teks dan penerima. Begitu juga dengan kehadiran frame dalam teks memungkinkan pandangan dari teks itu sendiri dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksikan media dalam pikiran khayalak.<sup>106</sup> Berikut perbandingan pbingkaian berita dalam media *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia*:

### 3.4 Tabel perbandingan framing *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia*

<b>Perbandingan Framing <i>CNNIndonesia.com</i> dan <i>BBC Indonesia</i></b>			
<b>No</b>	<b>Elemen</b>	<b>CNNIndonesia.com</b>	<b>BBC Indonesia</b>
1.	Define Problem	<p><i>a. Pendefinisian kasus Rohingya</i>                      -Kasus Rohingya adalah kasus kemanusiaan</p> <p><i>b. Pendefinisian keterlibatan Indonesia dalam merespon kasus Rohingya</i>                      -Penekanan pada pro-kontra berbagai pihak atas peran pemerintah.                      -Keterlambatan peran pemerintah</p>	<p><i>c. Pendefinisian kasus Rohingya</i>                      -Kasus Rohingya adalah kejahatan dan krisis kemanusiaan.</p> <p><i>d. Pendefinisian keterlibatan Indonesia dalam merespon kasus Rohingya</i>                      -Penekanan pada radikalisme di Indonesia.                      -Sinergi antara pemerintah, LSM, AKIM, umat Buddha, dan elemen masyarakat</p>

<sup>106</sup> Eriyanto, "Robert N. Entmann" dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 220.

			lainnya. -Peran aktif dan cepat tanggap pemerintah.
2.	Diagnose Causes	<p>a.Suu Kyi dan Pemerintah Myanmar adalah dalang di balik kekerasan di Rohingya, dengan memanfaatkan tangan kanan militernya.</p> <p>b.Pro-kontra keterlibatan pemerintah dalam membantu Rohingya</p>	<p>c.Myanmar dan Suu Kyi adalah aktor di balik tragedi Rohingya</p> <p>d.warga Rohingya sebagai korban.</p> <p>e.Keterlibatan Arsa malah memperumit dan membuat warga Rohingya diusir.</p> <p>f.Peningkatan aktivitas radikalisme di Indonesia yang memanfaatkan isu Rohinga</p>
3.	Moral Judgement	<p>a.Kasus Rohingya dianggap sebagai kasus tidak berperikemanusiaan</p> <p>b.Pembantaian warga Rohingya bukan sebuah insiden namun dilakukan atas dasar kesengajaan.</p> <p>c.Pemerintah dianggap lambat memberikan bantuan terhadap Rohingya.</p>	<p><i>d.Stigma negatif</i></p> <p>-Kasus Rohingya adalah kasus yang tidak berperikemanusiaan</p> <p>-Peningkatan aktivitas radikalisme di Indonesia mencederai proses penanganan kasus Rohingya.</p> <p><i>e.Stigma Positif</i></p> <p>-Ketulusan umat Buddha membantu Rohingya memberi teladan kerukunan umat beragama.</p> <p>-Peran aktif pemerintah</p>

4.	Treatment Recommendation	a.Pro-kontra peran pemerintah: -beberapa ormas menyatakan pemerintah lambat dalam menangani kasus Rohingya - beberapa berita menunjukkan bahwa pemerintah memberi bantuan diplomasi, kemanusiaan, akses kesehatan, dan pendidikan.	b.Memberikan bantuan diplomatis dan kemanusiaan. c.Membuka akses kesehatan dan pendidikan. d.Melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama menangani kasus Rohingya. e.Meredam peningkatan aktivitas radikalisme melalui peran aktif pemerintah.
----	--------------------------	--	---

Perbandingan di atas menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama dapat dimaknai dan didefinisikan secara berbeda. Pendefinisian yang berbeda dapat menyebabkan peristiwa berubah secara total.<sup>107</sup> Kedua media online baik *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia* membawa berita ke arah yang berbeda. Dalam proses pendefinisian kasus Rohingya, kedua media tersebut sama-sama memaknai Rohingya sebagai kasus kemanusiaan. Pengembangan berita keduanya diarahkan pada dua hal yang berbeda, terutama pembingkaiian peran pemerintah dalam menangani kasus Rohingya.

*CNNIndonesia.com* mengambil sumber berita lebih banyak dari hasil wawancaranya dengan berbagai ormas Islam di Indonesia mengenai tanggapan atau responnya terhadap peran pemerintah Indonesia. Sementara *BBC Indonesia* mengambil sumber berita dari berbagai LSM, ormas, maupun elemen-elemen yang mendukung peran pemerintah dalam menangani kasus Rohingya. Dalam proses diagnosis penyebab permasalahan. *CNNIndonesia.com* cenderung menjustifikasi Myanmar sebagai dalang tunggal dibalik kekerasan Rohingya, dan

<sup>107</sup> Eriyanto, "Robert N. Entmann" dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 251.

Rohingya adalah korban. Sementara BBC mendiagnosis permasalahan lebih luas dari itu, yakni keterlibata Arsa yang memperkeruh peristiwa, sehingga dalam level pemberitaan di Indonesia BBC mengangkat radikalisme sebagai topik utama yang mendukung kasus Rohingya.

*Moral judgment* yang ditawarkan *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia* memiliki kesamaan di satu sisi, dan perbedaan di sisi yang lain. Kedua media online membingkai kasus Rohingya sebagai permasalahan moral berkaitan dengan perikemanusiaan yang perlu dipertanyakan kepada Myanmar. Myanmar dianggap tidak memiliki perikemanusiaan dengan latar belakang negara yang mengaku sebagai negara multi-keagamaan. Di sisi lain *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia* memandang peran pemerintah secara berbeda. *CNNIndonesia.com* lebih menyoroti peran pemerintah yang dinilai kurang aktif berdasarkan pro-kontra yang dilontarkan dari sumber berita. Sementara itu *BBC Indonesia* mengapresiasi peran pemerintah yang tidak hanya berpengaruh besar bagi Rohingya, Myanmar, dan Bangladesh, namun juga terhadap penangkalan aktivitas radikalisme di Indonesia yang sempat ramai akibat kasus Rohingya.

Secara keseluruhan kedua media tersebut membingkai permasalahan ketika masalah Rohingya masih dilihat dari perspektif umum. Akan tetapi ketika permasalahan ditarik ke wilayah atau level pemberitaan di Indonesia. Kedua media ini memberikan pembedaan yang berbeda. Hal ini tidak lepas dari kondisi perpolitikan Indonesia sendiri. Sumber data yang diambil oleh *CNNIndonesia.com* berasal dari elemen masyarakat Indonesia yang memang memiliki pandangan kontra dengan pemerintah Indonesia. Sementara *BBC Indonesia* membingkai berita melalui hasil wawancara dengan elemen masyarakat Indonesia yang sedang bersinergi/bekerjasama dalam menangani kasus Rohingya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber data wawancara wartawan juga berpengaruh terhadap *framing* berita.

Media massa pada dasarnya adalah media diskusi publik antara wartawan, narasumber/ sumber berita, dan pembaca. Keterlibatan ketiga pihak tersebut tidak

terlepas dari peran sosial masing-masing dan hubungan ketigana disatukan dalam operasonalisasi teks yang mereka konstruksi. Di sinilah kemudian wacana berita menjadi arena perang simbolik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>108</sup>

Keputusan atau kecenderungan berita di media juga dipengaruhi oleh sumber elite yang diwawancarai wartawan. Dampak perang wacana menghasilkan efek framing yang berbeda dari setiap media. Dampak tersebut menghasilkan efek mendukung atau menentang, yang dalam bentuk konkretnya berupa penggambaran positif mengenai diri sendiri dan penggambaran negatif pihak-pihak lawan bicara.<sup>109</sup> Keempat perangkat framing Entman yang sudah dibahas pada bab sebelumnya merupakan sebuah strategi media untuk membentuk realitas peristiwa menurut versinya. Pada subbab ini akan dijelaskan efek framing dari perang simbolik antara media *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia*.

Media *CNNIndonesia.com* dan *BBC Indonesia* sama-sama mengonstruksikan kasus Rohingya sebagai kasus kemanusiaan. Akan tetapi, ketika berita ditarik ke wilayah nasional, kedua media tersebut memberikan pembingkaiian yang berbeda. Hal ini juga ditinjau dari sumber berita yang diwawancarai dan diambil datanya. *CNNIndonesia.com* cenderung mengarahkan berita pada pro-kontra atas ketegasan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Rohingya. Melihat sumber berita yang diambil dari elemen-elemen yang berbeda, seperti GP Ansor, PP Muhammadiyah, MPBKR, Kamra, Solidaritas Muslim Perempuan, BM PAN, PKS, FPI, dll. Semua elemen tersebut memberi sudut pandang yang berbeda dan rata-rata dari mereka menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih tegas.

---

<sup>108</sup> Eriyanto, "Robert N. Entmann" dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 230.

<sup>109</sup> Ibid., hlm. 231.

*BBC Indonesia* mengarahkan berita lebih pada peran aktif pemerintah yang berhasil menekan berbagai persoalan, baik persoalan Rohingya maupun dampak isu tersebut di dalam negeri. Sumber berita yang diambil oleh *BBC Indonesia* lebih banyak mengedepankan sajian data yang realistis. Narasumber adalah mereka yang turut aktif membantu pemerintah melancarkan pengaliran dana ke warga Rohingya, seperti Menlu RI, Staf Ahli Kemenlu, Ketua LSM PKPU, Pengamat Politik Asia Tenggara, Juru Bicara UNCHR, Kepala Divisi Konstruksi Mer-C, mantan Kepala BNPT, Pelapor HAM PBB, Sekjen PBB, dan lain-lain. *BBC Indonesia* juga menyajikan hasil keterangan pers langsung dari Presiden Republik Indonesia. *BBC* cenderung menyoroti langkah nyata yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu Rohingya.

Pembingkaiannya kedua media tersebut memunculkan efek yang berbeda. Efek framing ditujukan dari keberpihakan mereka dalam mengonstruksi berita. *CNN* dan *BBC* membawa latar belakang budaya yang berbeda. Meninjau latar belakang budaya mereka, *CNN* mengidentifikasi dirinya sejak awal sebagai media penyiaran komersial, sedangkan *BBC* memegang asumsi dasar bahwa media adalah media penyiaran publik yang didanai oleh publik. Oleh karena itu, *CNN* tidak menentukan apa yang perlu ditonton (dalam hal ini dibaca) oleh pemirsa, namun sebaliknya. Sementara *BBC* percaya atas kualitas programnya sehingga mereka mementingkan siaran yang berguna bagi publik (Nafi, 2015).<sup>110</sup>

*BBC* terlihat lebih memfokuskan berita pada pengentasan problem sosial yang diangkat, sedangkan *CNN* cenderung pada tanggapan-tanggapan pihak terkait pengentasan problem sosial yang dianggap belum memberi kejelasan peran. Di sinilah kedua media tersebut mengalami perang retorika yang memberikan efek keberpihakan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari definisi

---

<sup>110</sup> Muhammad Nafi, “*BBC dan CNN Menantang Zaman*” (10 Februari 2015), [www.remotivi.or.id/kupas/53/BBC-dan-CNN-Menantang-Zaman](http://www.remotivi.or.id/kupas/53/BBC-dan-CNN-Menantang-Zaman) diakses tanggal 20 Januari 2019.

dan pemahaman keduanya dalam menarik kasus Rohingya di tataran nasional. Selain itu, bagaimana kedua media memberikan sumber data yang terlibat. BBC memberikan data dari para ahli dan elemen-elemen yang bersentuhan langsung dalam proses pemberian bantuan kepada Rohingya. Sebagian berita CNN menyajikan berita mengenai peran pemerintah, akan tetapi CNN lebih banyak menyoroti pro-kontra berbagai pihak yang mempertanyakan langkah nyata dan peran pemerintah.

Dengan kata lain, kemungkinan efek yang diberikan perbedaan pandangan khalayak dalam menerima berita. Nada negatif akan timbul jika pemberitaan mengenai peran pemerintah dianggap belum mampu mengentaskan Rohingya dari kekerasan yang dialaminya, dan sebaliknya. Meninjau kondisi dalam negeri yang juga tidak satu frekuensi dalam memandang kinerja pemerintah, framing kedua media tersebut dapat memberikan dampak yang juga mengarah pada pro-kontra terkait kinerja pemerintah.

## **B. Agenda Setting Mempengaruhi Framing Media CNN Indonesia dan BBC Indonesia**

Agenda merupakan sekumpulan isu yang dikomunikasikan dalam hierarki kepentingan pada titik tertentu, sehingga agenda setting didefinisikan sebagai proses dalam kompetisi yang sedang terjadi antara *issues proponents* atau isu utama untuk memperebutkan perhatian media, publik dan elit-elit pembuat kebijakan.<sup>111</sup>

Dalam agenda setting media, ada strategi dan kerangka yang dimainkan oleh media sehingga pemberitaan peristiwa memiliki nilai lebih terhadap persoalan yang muncul. Selain sebagai sumber informasi bagi publik, media juga memerankan fungsi untuk membangun opini publik secara kontinyu dan

---

<sup>111</sup> Dearing dan Rogers, "Agenda Setting Research: Where has it been, where is it going?" dalam *Communication Yearbook II*, (Beverly Hill: Sage Publication, 1988), hlm. 23.

menggerakkan publik untuk memikirkan satu persoalan secara serius, serta mempengaruhi para elit dalam mengambil keputusan.

Penonjolan aspek yang dimaksudkan tersebut mempengaruhi arah framing CNN dan BBC. Dalam agenda setting apa yang dianggap penting oleh media dianggap penting juga oleh publik. Framing kedua media tersebut dipengaruhi oleh kepentingan media dalam menggiring opini publik. Ditinjau dari latar belakang keduanya, BBC mendedikasikan diri pada keunggulan; pada inovasi dan keaslian. Mencapai kualitas tertinggi pada segala hal yang kami lakukan; sebuah komitmen pada departemen program yang merekrut dan melatih kemampuan orang.<sup>112</sup> Sementara CNN mengidentifikasi diri sebagai media komersial, sehingga publik di sini memegang kendali. Di sini penyiaran merupakan suatu usaha dan sebagai usaha harus bekerja keras untuk memaksimalkan keuntungan supaya terus hidup.<sup>113</sup>

Pola-pola Framing dalam CNN dan BBC dipengaruhi oleh agenda setting yang dijalankan oleh masing-masing media. Dalam agenda setting isu merupakan objek yang diolah dan disajikan kepada khalayak. Isu didefinisikan sebagai peristiwa atau kondisi yang melibatkan perbedaan pendapat atau pertentangan antar kelompok dalam masyarakat. Isu juga dipahami sebagai suatu permasalahan oleh kelompok.<sup>114</sup> Hal ini terlihat kuat dalam media online CNN Indonesia dalam mengolah isu yang disajikan berpengaruh terhadap agenda-agenda publik dan kebijakan pemerintah.

Agenda media dalam mengemas isu Rohingya terhubung dengan agenda publik yang menyatakan demo dan pro-kontra atas keterlibatan pemerintah dalam

---

<sup>112</sup> Lucy Kung Shankleman, *Inside BBC dan CNN: Perbandingan Budaya Organisasi Media*, diterjemahkan oleh Kresno Saroso (Jakarta: KBR 68 H, 2003 ), hlm 214.

<sup>113</sup> Ibid, hlm 135.

<sup>114</sup> Dedy N Hidayat, *Agenda Setting, Bahan Kuliah Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Fisip UI, 1995), hlm 1.

menangani kasus Rohingya. Agenda publik tersebut berakhir pada pernyataan sikap pemerintah. Begitu pula dengan media BBC Indonesia, akan tetapi BBC lebih menekankan pada peningkatan aktivitas radikalisme sebagai agenda publik dalam merespon konflik Rohingya. Kebijakan pemerintah dianggap pro-aktif tidak hanya untuk mengatasi konflik Rohingya, akan tetapi juga menggerus gerakan radikal yang memanfaatkan isu Rohingya.

Fungsi agenda setting bekerja pada media online seperti BBC dan CNN, dan pada publik sebagai consumer aktif. Penulis menemukan bahwa agenda setting media masih relevan di tengah perkembangan media online dan publik yang dinamis. Liputan yang disajikan oleh wartawan CNN cenderung mengambil pendapat narasumber dari elite birokrasi. Sementara liputan wartawan BBC mengambil data dari narasumber yang ahli di bidang masing-masing dan terlibat langsung dalam pemberian bantuan terhadap warga Rohingya, semisal pengamat politik Asia Tenggara, pengamat media sosial, ketua PMI, dan sebagainya.

Jangkauan kedua media online tersebut sama-sama sangat luas. Kedua media menunjukkan bagaimana media memiliki hubungan atau korelasi dengan tindakan publik dan kebijakan pemerintah. Hal ini terlihat dari keduanya menyajikan berita pada pemberitaan periode September 2017. Isu disajikan oleh redaksi dan diterima oleh masyarakat luas. Masyarakat menyatakan aksi dan berbagai pendapat dilontarkan sehingga mendorong peran aktif pemerintah untuk turut mengatasi konflik Rohingya. Dari sini penulis melihat adanya pengaruh agenda setting oleh kedua media tersebut terhadap framing berita. Audiens tidak hanya diajak untuk menerima berita secara pasif, namun tindakan yang dilakukan oleh audiens atas pengaruh pemberitaan juga berdampak pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah.